

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PAPUA  
MELALUI MAJELIS RAKYAT PAPUA**

*(Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura)*

**TESIS**

Oleh

Pahri

NIM 15800005



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM  
MALANG  
2017**



**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PAPUA  
MELALUI MAJELIS RAKYAT PAPUA**

*(Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura)*

Tesis

Diajukan Kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Magister  
Ekonomi Syariah

Oleh

Pahri

NIM 15800005

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM  
MALANG  
2017**

## **LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS PEMBIMBING**

Tesis dengan judul : Model pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui Majelis Rakyat Papua (*Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura*) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang,.....  
Pembimbing I



H. Slamet, SE., MM., Ph.D.  
NIP :1966041 2199803 1003

Malang,.....  
Pembimbing II



Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si  
NIP :19711110811998032002

Malang, .....  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah

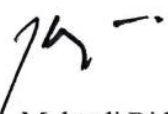


Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A  
NIP : 1973330719 20051 1 003


## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS PEMBIMBING

Tesis dengan judul : Model pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui Majelis Rakyat Papua (Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura) ini telah diuji dan di pertahankan di depang siding dewan penguji pada tanggal 11 september 2017.


Dewan Penguji,

  
Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag  
NIP: 195503021987031004


Ketua

  
Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si  
NIP: 19670227 1998032001

Penguji Utama

  
H. Slamet, SE., MM., Ph.D  
NIP: 196604121998031003

Anggota

  
Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si  
NIP. 197111081998032002

Anggota

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Baharudin., M.Pd.I  
NIP. 19561231 1983031032

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pahri  
NIM : 15800005  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : Model pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui Majelis Rakyat Papua (*Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 07 Agustus 2017

Hormat Saya

  
Pahri

NIM : 15800005



## PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kupersembahkan karya kecil ini kepada orang-orang yang telah dengan tulus dan sabar memberikan semangat dukungan, pengertian ilmu dan do'a bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi Magister Ekonomi

Syariah, Ucapakan penulis kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Hamri dan Ibu Fatimah yang tak hentinya mendo'akan penulis dan dukungan moril serta semangat dari kejauhan Kota Makassar. Bapak H.Suroso, SE dan Keluarga yang juga tak hentinya ikut memberi dukungan moril semangat serta nasehat-nasehat untuk kelancaran menyelesaikan studi ini. Saudara-saudara penulis Kakakku Tamsir S.Pd, adikku Basri, Fatmawati, Hijriani, Sahrul Gunawan, Ismawati yang juga ikut serta memberi dukungan dan semangat. Istriku tercinta Nurul Istiqomah, SE yang selalu sabar dan setia memberikan penulis semangat serta dukungan yang tak hentinya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

## **MOTTO**

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا  
مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (١١)

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka  
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” [Ar-Ra’d/13:11].*



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusun ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, Tesis yang berjudul **“Tesis dengan judul Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Papua Melalui Majelis Rakyat Papua” (*Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura*)** dapat terselesaikan dengan baik, dan dapat memberikan guna serta manfaat dikemudian hari.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni, *Ad-Diinul Islam*.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penyusun sampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *JazakumullahAhsanulJaza'* Khususnya Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag dan Para Pembantu Rektor, atas segala pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I, yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penyusun selama menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah, Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA. terima kasih atas motivasi dan kemudahan selama menjalankan studi.
4. Dosen Pembimbing I, Bapak H. Slamet, SE., MM., Ph.D. atas bimbingan, saran, kritikan, masukan, serta koreksinya kepada penulis dalam penulisan tesis
5. Dosen Pembimbing II, Ibu Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si atas bimbingan, saran, kritikan, masukan, serta koreksinya kepada penulis dalam penulisan tesis

6. Semua staff pengajar, dosen dan semua staff TU Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penysusun
7. Semua sivitas akademik STAIN Jayapura yang telah memberikan motivasi dan doanya.
8. Bapak Sineri selaku kepala Persidangan Majelis Rakyat Papua yang bersedia memberikan informasi dan berdiskusi tentang pengelolaan MRP
9. Ibu Betty A.Puy, selaku Kepala dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Jayapura yang bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang model pemberdayaan perempuan asli Papua
10. Ibu Dra. Maria Nere sebagai penggerak organisasi yang bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan informasi tentang pengelolaan Majelis Rakyat Papua.
11. Kedua orang tua dan nenek-kakek yang tanpa kenal lelah dan selalu sabar dalam memberikan bantuan secara moril dan materi hingga tercapainya tahap akhir penulisan ini.
12. Untuk kawan-kawan perkuliahan satu angkatan Magister Ekonomi Syari'ah 2015 baik kelas A dan B. Terkhusus kelas A yang telah menjadi keluarga penulis selama masa perkuliahan ini.
13. Dan tak lupa kepada Yayasan Al-Hidayah Nusantara Papuayang selalu memberikan masukan, penyemangat, dikala penulis mengalami kesusahan,

Batu, 7 Agustus 2017

Penyusun,

**Pahri**

**Nim : 15800005**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Lembar Logo .....	ii
Halaman Judul .....	iii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iv
Lembar Pengesahan .....	v
Lembar Pernyataan Orisinalitas Penelitian.....	vi
Lembar Persembahan .....	vii
Lembar Motto .....	viii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar/Skema .....	xiv
Daftar lampiran.....	xv
Abstrak .....	xvi

### **BAB I: PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Definisi Istilah.....	15

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA ..... 16**

A. Konsep Pemberdayaan Ekonomi .....	16
1. Definisi Model .....	16
2. Definisi Pemberdayaan .....	16
3. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi .....	21
4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi .....	24
5. Faktor-faktor Kegagalan Pemberdayaan Ekonomi .....	24
6. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi .....	25
7. Sistem Pemberdayaan Ekonomi.....	27

B. Kerangka Berpikir .....	30
<b>BAB III: Metode Penelitian .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Kehadiran Peneliti .....	33
C. Latar Penelitian .....	34
D. Data dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. <b>Paparan Data</b> .....	43
1. Sejarah Singkat Gambaran Umum Kota Jayapura.....	43
2. Program Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan .....	47
B. <b>Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Papua</b> .....	50
1. Kondisi Kelembagaan di Kota Jayapura .....	50
2. Program Pemerintah Terhadap Masyarakat Perempuan Papua .....	56
3. Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	60
4. Hasil Temuan Penelitian .....	65
5. Dampak Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....	67
<b>BAB V: PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. <b>Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Papua Melalui Majelis Rakyat Papua</b> .....	74
1. Model Pemberian Bantuan Modal .....	74
2. Pelatihan Home Industri.....	77
B. <b>Dampak Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Papua</b> .....	82
1. Kebebasan Mobilitas .....	83
2. Kemampuan Membeli Komoditas Kecil dan Besar .....	85
3. Terlibat dalam Pengambilan Keputusan .....	86
4. Kesadaran Hukum dan Politik .....	87
<b>BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	91
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>94</b>
<b>Lampiran-lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Penduduk Kota Jayapura Perdistrik Tahun 2015 .....	2
1.2 PDRB Kota Jayapura atas Dasar Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2014-2015 .....	4
1.3 Panduan Wawancara .....	36
1.4 Model Observasi .....	37
1.5 Wilayah Kampung Menurut Distrik di Kota Jayapura .....	44
1.6 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	46
1.7 Pegawai Menurut Suku .....	49
1.8 Penduduk Asli Papua Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	69
1.9 Keadaan Ekonomi Masyarakat Asli Papua .....	72

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berpikir .....	31
2.2 Luas Wilayah Menurut Distrik Kota Jayapura .....	44
3.1 Struktur Organisasi Lembaga Majelis Rakyat Papua .....	53
3.2 Struktur Sekretariat Majelis Rakyat Papua.....	53
4.2 Gambar Pasar Sementara Mama-mama Papua.....	57
4.3 Gambar Pasar Mama-mama Papua dalam Tahap Pembangunan .....	58
4.4 Gambar Mama-mama Papua Menggelar Barang Dagangan .....	59
4.5 Gambar Kegiatan Pelatihan Keterampilan Tahun 2016 .....	62
4.6 Gambar Pelatihan Pembuatan Bakso.....	64
4.7 Gambar Model pemberdayaan perempuan asli Papua .....	66
4.8 Gambar Hasil Kerajinan Noken .....	80

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat izin penelitian dari UIN Malang
2. Surat balasan dari penelitian,
3. Dokumentasi penelitian

## ABSTRAK

Pahri. 2017. Model pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua (studi kasus perempuan asli Papua di Kota Jayapura), Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (I) H. Slamet, SE. MM.Ph.D, (II) Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si

---

**Kata Kunci:** Model Pemberdayaan, Ekonomi Perempuan

Perempuan asli Papua di Kota Jayapura memiliki peranan penting dalam keluarga. Mereka dalam kesehariannya tidak hanya sebagai Ibu rumah tangga melainkan juga sebagai tulang punggung keluarga. Hal inilah yang mendasari terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) agar kesejahteraan masyarakat perempuan asli Papua mampu meningkatkan kesejahteraan dengan adanya pemberdayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat model dan dampak dari pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua di Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam analisis data, peneliti melakukan beberapa tahapan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua model pemberdayaan masyarakat perempuan asli Papua yaitu: 1) Pemberdayaan melalui bantuan modal. 2) Pemberdayaan melalui pelatihan. Sedangkan dampak pemberdayaan terhadap masyarakat perempuan asli Papua adalah: 1) Kebebasan Mobilitas. 2) Kemampuan membeli komoditas kecil dan besar. 3) Terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga. 4) Kesadaran akan hukum dan politik.



## مستخلص البحث

فخري، ٢٠١٧. نموذج تمكين الاقتصاد للمرأة بابوا الأصلية من خلال مجلس القوم بابوا (دراسة حالة في نساء بابوا بمدينة جايا فورا)، رسالة الماجستير. قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. الحاج سلامت الماجستير. المشرف الثاني: د. الحاجة إلفي نور ديانة الماجستير.

## الكلمات الرئيسية: نموذج التمكين، اقتصاد المرأة

مرأة بابوا الأصلية بمدينة جايا فورا لها دور هام في الأسرة، هن في حياتهن اليومية ليست ربة البيت فحسب، بل كانت مسؤولة الأسرة. وهذا الموضوع الذي يكون الخلفية في تشكيل مجلس القوم بابوا من أجل رفاهية المرأة بابوا في ترقية رفاهيتهن من خلال تمكين المرأة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة النموذج والآثار المترتبة من تمكين الاقتصاد للمرأة بابوا الأصلية من خلال مجلس القوم بابوا بمدينة جايا فورا. استخدم هذا البحث منهج البحث النوعي الوصفي بتصميم دراسة الحالة. أما طريقة جمع البيانات فاستخدم الباحث الملاحظة، المقابلة والوثائق. وفي تحليل البيانات قام الباحث بتنفيذ بعض المراحل؛ منها تحديد البيانات، عرضها والاستنتاج منها.

وأظهرت نتائج هذا البحث أنّ هناك نموذجين في تمكين الاقتصاد للمرأة بابوا الأصلية؛ هما: (١) التمكين من خلال المساعدة المالية للعمل التجاري، (٢) التمكين من خلال التدريب. وأما الآثار المترتبة من ذلك التمكين على المرأة بابوا الأصلية فهي كما يلي: (١) حرية التنقل. (٢) القدرة على شراء السلع الصغيرة والكبيرة. (٣) التدخل في اتخاذ القرارات المنزلية. (٤) الوعي بالقانون والسياسة.

## ABSTRACT

Pahri. 2017. Economic Empowerment Model of Women in Papua through Papuan People's Council (indigenous Papuan women case study). Graduate Program of Economic Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisors: (I) H. Slamet, SE. MM.Ph.D, (II) Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si.

---

Keywords: Empowerment Model, Women Economy.

Papuan women in the city of Jayapura have an important role in the family. In their daily life, they are not only play role as housewives but also as the breadwinner. This phenomenon underlies the idea of forming Papuan People's Council (*Majelis Rakyat Papua or MRP*) for the welfare of indigenous Papuan women to improve their welfare with empowerment.

This study aimed at reviewing the model and impact of economic empowerment of indigenous Papuan women through Papuan People's Council in Jayapura. In addition, this research applied descriptive qualitative research by using case study approach. The researcher used observation method, interview and documentation for data collection. Then for data analysis, the researcher performed several reduction steps, data presentation and making conclusion.

The results of this study revealed that there are two models of empowerment of indigenous women of Papua; 1) empowerment through capital assistance, 2) empowerment through training. In addition, the empowerment of indigenous women of Papua brings some effects like; 1) freedom of Mobility, 2) the ability to buy small and large commodities, 3) engage in household decisions, and 4) awareness of law and politics.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota Jayapura merupakan wilayah administratif yang ditetapkan pada tanggal 14 September 1979 dan berubah status menjadi Kotamadya pada tahun 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993. Luas wilayah Kota Jayapura mencapai 940 km<sup>2</sup> yang terbagi 5 (lima) distrik antara lain: Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, Distrik Muara Tami, dan Distrik Heram, Dari 5 (lima) distrik yang berada dalam wilayah Kota Jayapura Distrik Muara Tami merupakan Distrik paling luas dibandingkan beberapa Distrik lainnya. Luas wilayah Distrik Muara Tami 626,7 km<sup>2</sup> atau 66,67% dari luas seluruh Kota Jayapura. Selain itu pula Distrik Abepura menempati distrik kedua paling luas di wilayah Kota Jayapura dengan luas mencapai 155,7 km<sup>2</sup> atau setara 16,56% total luas wilayah Kota Jayapura. Sedangkan distrik yang tidak luas (paling sempit) luas wilayahnya adalah Distrik Jayapura Selatan dengan luas wilayah mencapai 43,4 km atau 4,62 luas wilayah Kota Jayapura.<sup>1</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Jayapura tahun 2015, tercatat jumlah penduduk Kota Jayapura mencapai 283.490 jiwa atau bertambah 2,83 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Abepura dengan jumlah penduduk 80,618 orang. Sedangkan Distrik Muara Tami merupakan distrik dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 12.381 orang.

---

<sup>1</sup>BPS Kota Jayapura, *Gambaran Umum Kondisi Daerah*, 2010-2015

Tahun 2015 jumlah rumah tangga di Kota Jayapura tercatat 66.861 rata. Dengan jumlah penduduk laki-laki 148.450 jiwa dan dan perempuan 135.040 jiwa, rasio jenis kelamin di Kota Jayapura sebesar 110 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 10 persen daripada penduduk perempuan. Yaitu 1.485 orang/km<sup>2</sup> dan 1.305 orang/km<sup>2</sup> dibandingkan 3 (tiga) Distrik lainnya. Tingkat kepadatan penduduk Kota Jayapura terendah terdapat di Distrik Muara Tami dengan kepadatan 18 orang/km. Sedangkan penduduk kota Jayapura berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, Dimana 148.450 orang adalah laki-laki dan 135. 040 jenis kelamin Kota Jayapura sebesar 110 yang berarti jumlah penduduk Kota Jayapura laki-laki lebih banyak 10% dari penduduk perempuan.<sup>2</sup>Seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Jayapura Per Distrik Tahun 2015**

NO	DISTRIK	TAHUN 2015
1	Jayapura Utara	71.900
2	Jayapura Selatan	74.112
3	Heram	44.481
4	Abepura	80.618
5	Muara Tami	12.379
<b>JUMLAH</b>		<b>283.490</b>

*Sumber : BPS Kota Jayapura, Tahun 2015*

Sedangkan berdasarkan kegiatan ekonomi, menurut pengamatan peneliti bahwa pada umumnya kegiatan ekonomi yang ada di Jayapura tergantung di mana mereka tinggal. Penduduk yang tinggal di pedalaman bekerja sebagai peramu

---

<sup>2</sup>BPS Kota Jayapura, *Gambaran Umum Kondisi*, 2014-2015

sagu, berkebun, menangkap ikan di sungai, berburu di hutan di sekeliling lingkungannya. Mereka senang mengembara dalam kelompok kecil. Sebagian dari mereka ada yang mendiami tanah kering dan ada yang mendiami rawa. sedangkan penduduk yang tinggal di pegunungan kebanyakan bekerja dengan bercocok tanam dan memelihara ternak, kadang kala mereka berburu dan memetik hasil dari hutan. Pola pemukimannya tetap secara berkelompok.

Kota Jayapura dalam perekonomian Provinsi Papua adalah paling besar. Pada tahun 2009, pendapatan per kapita Kota Jayapura sebesar Rp. 10,74 juta per kapita. Sedangkan Provinsi Papua diperkirakan sebesar Rp. 5,28 juta per kapita untuk tahun yang sama. Dibandingkan dengan pendapatan per kapita di tingkat Provinsi, maka Pendapatan perkapita Kota Jayapura tampak lebih tinggi. Meskipun ukuran pendapatan per kapita saat ini masih diperdebatkan dalam menghitung tingkat kesejahteraan suatu wilayah, namun paling tidak dari indikator ini dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan wilayah di Kota Jayapura masih lebih tinggi dibandingkan tingkat Provinsi Papua secara menyeluruh. Dan hal tersebut juga mengindikasikan bahwa produktifitas ekonomi wilayah di Kota Jayapura jauh lebih baik dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Papua.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>RPMJD Kota Jayapura 2012-2016

**Tabel 1.2**  
**PDRB Kota Jayapura Atas Dasar Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**2014-2016 (juta rupiah)**

<b>Kategori</b>	<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1.012.290,7	1.138.788,5	1.298.533,6
B	Pertambangan dan pengalihan	82.848,1	95.714,4	110.805,3
C	Industri Pengolahan	478.201,3	566.516,9	611.246,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.415,1	9.005,7	12.349,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27.371,4	30.646,4	32.524,1
F	Konstruksi Perdagangan besar dan Eceran	3.697.166,5	4.791.783,7	5.675.323,5
G	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.874.342,3	3.261.773,2	3.634.370,4
H	Transportasi dan Pergudangan	891.724,6	1.033.516,7	1.146.880,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	370.558,8	462.733,0	531.096,1
J	Informasi dan Komunikasi	1.822.895,5	2.135.375,4	2.318.078,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.822.895,5	2.135.375,4	2.318.078,1
L	Real Estate	851.457,6	987.133,5	1.049.326,1
M, N	Jasa Perusahaan	943.430,3	1.094.095,2	1.237.889,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	600.150,1	676.662,2	725.260,7
P	Jasa Pendidikan	2.136.906,7	2.633.327,4	3.139.347,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	747.528,2	828.186,5	917.358,8
R, S, T, U	Jasa Lainnya	358.398,7	442.523,8	502.737,7
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>17.574.541,9</b>	<b>20.938.535,1</b>	<b>23.780.572,3</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pemerintah Kota Jayapura bahwa meskipun perkembangan ekonomi masyarakat Kota Jayapura mengalami peningkatan, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih dalam ranah belum sejahtera.<sup>4</sup> Hal tersebut yang menjadi alasan bagi para perempuan asli Papua untuk mengambil tanggung jawab keluarga yang disebabkan oleh ketidakmampuan kepala keluarga yang pada hakikatnya adalah para lelaki untuk menafkahi keluarga mereka.

Perempuan masyarakat Asli Papua yang dalam kesehariannya tidak hanya sebagai Ibu rumah tangga melainkan juga sebagai tulang punggung keluarga. Berdasarkan pengamatan peneliti, pekerjaan yang mereka lakukan adalah sebagai pedagang, petani dan peternak. Pekerjaan ini dimulai pada waktu pagi hari, yaitu dengan mengurus anak, kemudian berkebun dan diakhiri dengan menjual hasil perkebunan mereka ke pasar. Menurut peneliti, hal tersebut merupakan kegiatan yang tidak lazim yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi para ibu rumah tangga yang dikenal dengan “Mama Papua” merupakan ujung tombak keluarga. Sementara itu, pendapatan keluarga bersumber dari hasil jualan “Mama Papua” dan dimaksimalkan untuk seluruh kebutuhan keluarga, khususnya biaya pendidikan anak.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas mendasari terbentuknya lembaga swasta Majelis Rakyat Papua (MRP) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat asli Papua. Majelis Rakyat Papua, yang di sebut MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang

---

<sup>4</sup>Pemerintah Kota Jayapura, *Gambaran Umum Kondisi Daerah*, 2012-2016

tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.<sup>5</sup>

Lahirnya MRP dalam sistem pemerintahan di Papua merupakan upaya memberdayakan orang asli Papua. Hal ini merupakan salah satu penegasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua terutama masalah kesenjangan sosial, ekonomi yang menempatkan orang asli Papua berada pada posisi pinggiran. Dengan ini pemberdayaan secara serius menempatkan posisi masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat pada posisi yang layak.

Pemberdayaan terhadap perempuan di Papua mendapat penanganan serius setelah diberlakukannya Undang-Undang khusus bagi masyarakat asli Papua. Undang-undang ini menegaskan tentang kewajiban pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten untuk menegakkan hak azasi kaum perempuan terutama menyangkut pembinaan dan pemberdayaan serta memposisikan kaum perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki. Keterlibatan perempuan didalam salah satu kelompok kerja MRP membawa paradigma baru dalam penyelesaian permasalahan perempuan di Papua, karena kaum perempuan khususnya orang asli Papua telah menjadi bagian penting untuk ikut mengambil bagian dalam proses pembangunan. Perhatian terhadap perempuan asli Papua ini juga dilatarbelakangi oleh kondisi mereka yang selama

---

<sup>5</sup>UU No 21 Tahun 2001, *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Bab 1 Pasal 1 Poin g, hlm 3



ini ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka senantiasa menjadi korban kekerasan baik yang terjadi dalam rumah tangga maupun kekerasan kultural maupun kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dalam bidang pendidikan pun perempuan asli Papua mereka kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan laki-laki.<sup>6</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas sebagai syarat cukup dalam pembangunan ekonomi, sudah pasti dibutuhkan pemberdayaan masyarakat lebih nyata. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses perolehan pelaku ekonomi untuk mendapatkan *surplus value* sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dapat dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi (melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dan kondisi dan tingkat sosial ekonomi budaya masyarakat setempat). Selanjutnya model strategi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat secara nyata tersebut dapat dilakukan melalui enabling, empowering dan protecting.<sup>7</sup>

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu solusi alternatif untuk mensejahterakan masyarakat asli Papua untuk merealisasikan, peran masyarakat, pemerintah dan swasta sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu adanya model-model yang tepat melalui kebijakan maupun program berbagai kegiatan yang mendukung di Kota Jayapura. Pemberdayaan perempuan sangat penting karena merekalah yang umumnya belum mendapatkan kesempatan. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat berfungsi sebagai subyek maupun obyek dalam berbagai aspek

---

<sup>6</sup>UU No 21 Tahun 2001, *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Bab 1 Pasal 1 Poin g, hlm 3

<sup>7</sup>P.Eko Prasetyo dan Situ Maisaroh, *Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*, ISSN 1411-514X, Volume 8 No.2, Desember 2009, Hlm 103

pembangunan, baik sebagai perencana, pengambil keputusan, pelaksana, maupun mengevaluasi dan menikmati berbagai hasil pembangunan secara merata. Penelitian tentang pemberdayaan perempuan sampai saat ini umumnya lebih fokus pada hal yang bersifat negatif seperti diskriminasi jenis kelamin, kekerasan pada perempuan, pembatasan kesempatan karier dan lain-lain, sementara untuk melihat sisi positifnya masih jarang dilakukan.

Dalam penelitian Yoseb Boari dalam Judul Tesis Berjuang di antara peluang, dia hanya fokus pada masyarakat asli Papua pada lingkup kegiatan pasar dalam menemukan cara yang dilakukan mama Papua dan peluang hanya dengan proses mendapatkan barang dagangan dan pendistribusiannya dan penelitian Sofia Bunsapia dengan judul Tesis pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua menurut Otonomi Khusus, dia hanya fokus mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang MRP menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, belum memberikan model pemberdayaan perempuan Papua agar sejahtera.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data di atas, peneliti melihat bahwa pada penduduk perempuan asli Papua belum ditemukan model pemberdayaan. Peneliti melihat bahwa majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga pemberdayaan belum mampu memberdayakan perempuan Papua secara maksimal. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti akan mengkaji bagaimana model pemberdayaan perempuan asli Papua diterapkan di Kota Jayapura.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncul beberapa masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) ?
2. Bagaimana dampak Model Pemberdayaan ekonomi Perempuan yang dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka tujuan yang akan melandasi dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa model pemberdayaan Ekonomi perempuan melalui Majelis Rakyat Papua.
2. Menganalisa dampak adanya lembaga Majelis Rakyat Papua.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Mengembangkan pengetahuan sekaligus memberikan implikasi teoritis sesuai disiplin ilmu yang dimiliki.
2. Memberikan manfaat dan berguna bagi kalangan pembuat kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai masukan yang bersifat ilmiah dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua.

3. Dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan masalah pemberdayaan Ekonomi perempuan masyarakat asli Papua.

### E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	<p>Lintar Brilliant Pintakami Tesis Tahun 2013</p> <p><b>Judul</b> (Keterlibatan Perempuan Tani Pada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Rangka Mencapai Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang)</p>	<p>Sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah melalui program bersama masyarakat.</p>	<p>Dalam penelitian ini dibahas lebih mendalam mengenai peran antara laki-laki dan perempuan di kawasan hutan, sejauhmana keterlibatan perempuan tani dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan hutan, dan kontribusi pendapatan perempuan tani di kawasan hutan untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga.</p>	<p>Dalam penelitian ini bahwa perempuan yang berada di kawasan hutan, sebagian besar menggantungkan kebutuhan hidupnya dari sumberdaya alam yang ada di hutan. Keterlibatan perempuan kawasan hutan dalam mewujudkan kesejahteraan rumah tangga sangat besar. Namun rendahnya akses perempuan tani terhadap sumberdaya yang ada menyebabkan mereka tidak mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan.</p>

2	<p>Yoseb Boari Tesis Tahun 2014</p> <p><b>Judul</b> Berjuang Di Antara Peluang (Studi Kasus Pedagang Mama- mama Asli Papua di Pasar Remu Kota Sorong)</p>	<p>Sama-sama meneliti masyarakat perempuan asli Papua, terkait sejauh mana masyarakat itu berkembang dalam perekonomiannya.</p>	<p>Perbedaanya adalah peneliti fokus hanya pada masyarakat asli Papua yang berada pada lingkup kegiatan pasar dalam menemukan cara yang dilakukan oleh mama-mama papua dan peluang yang berhubungan dengan proses mendapatkan barang dagangan dan pendistribusiannya.</p>	<p>Pasar Remu menjadi salah satu tempat kegiatan jual beli mama-mama asli Papua. Mama-mama papua mengandalkan kebun sebagai sumber barang dagangan adapula yang mengandalkan modal untuk mendapatkan barang dagangan. Namun dari kedua cara tersebut mempunyai kelemahan dan kekuatan masing- masing, sehingga mama-mama asli Papua harus pandai menangkap peluang yang ada untuk mempertahankan eksistensinya di Pasar Remu.</p>
---	---	---	---	---

3	<p>Moh. Rifa'i Tesis Tahun 2008</p> <p><b>Judul</b> Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus M.A T.M.I Al-amien Prenduan Sumenep)</p>	<p>sama-sama pendekatan kualitatif, sama-sama meneliti pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Peneliti fokus pada manajemen humasnya lembaga pendidikan itu sendiri kaitannya dengan hubungannya dengan masyarakat umum, sedangkan ini bagaimana menciptakan program untuk memberdayakan masyarakat dengan harapan mutu akan meningkat</p>	<p>Dalam meningkatkan mutu pendidikan lembaga M.A melakukan program pemberdayaan lewat humas pusat Yayasan Al-Amien Prenduan (YPA), dengan memberdayakan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan terhadap masyarakat berkelompok</p>
---	--	--	---	---

4	<p>Haryanto Tesis Tahun 2008</p> <p><b>Judul</b> Peran Aktif Wanita dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus pada wanita pemecah batu di pucanganak Kecamatan Tugu Tranggalek)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan peran wanita sama-sama ikut serta dalam kesejahteraan rumah tangga.</p>	<p>Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang peningkatan pendapatan rumah tangga.</p>	<p>Kontribusi pendapatan pekerja wanita terhadap pendapatan suami cukup signifikan. Pendapatan wanita pemecah batu juga merupakan pendapatan keluarga. Penggunaan pendapatan merupakan penggunaan atau belanja untuk kebutuhan keluarga. Penggunaan untuk kebutuhan keluarga tersebut antara lain untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan sekolah dan juga untuk kebutuhan yang sifatnya sosial, seperti arisan, bowo (menyumbang orang yang punya hajatan)</p>
---	---	---	---	--



## **F. Definisi Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman kajian penelitian dan menghindari terjadinya kesalahan menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memaparkan definisi dari istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua yang diberikan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan di jalankan oleh pemerintah Kota Jayapura.
2. Pemberdayaanyang di maksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk memberikan kemampuan atau kekuatan pada masyarakat perempuan asli Papua untuk bisa menjadi perempuan yang mandiri dengan potensi yang dimiliki.
3. Majelis Rakyat Papuaadalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Dalam hal ini peneliti akan membahas bagaimana model pemberdayaan terhadap perempuan asli Papua di Kota Jayapura.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

##### 1. Defenisi Model

Model, Pola (acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan, orang yang dipakai sebagai contoh untuk dilukis (difoto), orang yang (pekerjaannya) memperagakan contoh pakaian yang akan dipasarkan, barang tiruan yang kecil dengan bentuk (rupa) persis seperti yang ditiru.<sup>8</sup>

##### 2. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan asal katanya berasal dari kata daya atau *power*, pemikiran modern tentang *power* muncul pertama kali dalam tulisan Nicollo Machiavelli dalam *The Prince*, di awal abad ke-6, dan Thomas Hobbes dalam *Leviathan* pada pertengahan abad ke-17.<sup>9</sup>

Pemberdayaan menurut Jim Ife dapat didefinisikan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang (masyarakat) atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi komunitas kehidupan mereka. Sedangkan makna pemberdayaan menurut Loekman Soetrisno yaitu masyarakat harus diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain,

---

<sup>8</sup>Kamus Bahasa Indonesia Untuk Belajar, *Meity Taqdir Qodratilah*, Cetakan Pertama, 2011, Jakarta, hlm 326

<sup>9</sup>Siti Amanah & Nani Famayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan Keunikan Agrosistem dan Daya Saing*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm 1

di samping mereka harus aktif berpartisipasi dalam pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.<sup>10</sup>

Pemberdayaan menurut Indrasari Tjandraningsih, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.<sup>11</sup>

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Penggunaan konsep pemberdayaan yang berbeda oleh berbagai pakar dari berbagai bidang keahlian telah menciptakan definisi pemberdayaan. Dari organisasi, Lyons, et al, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses yang dilalui agar masyarakat memperoleh kendali lebih besar akan urusan/masalah mereka dan meningkatkan inisiatif yang berhubungan dengan nasib mereka sendiri. Lyons, et al, berpendapat bahwa suatu komunitas masyarakat harus memenuhi dua kondisi sosial untuk dapat mengalami proses pemberdayaan, yaitu anggota masyarakat harus mempunyai perasaan bemosyarakat dan anggota masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam

---

<sup>10</sup>Sri Suhandjati, *Ragam Pemberdayaan Perempuan Versi Organisasi Perempuan Islam Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, hlm 18

<sup>11</sup>Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, Pustaka Pesantren, 2005, hlm 169

<sup>12</sup>Totok Mahardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (eds Revisi)*, Alfabeta Bandung, 2015, hlm 28

kegiatan komunitas tersebut. Perasaan bermasyarakat dipandang sebagai: (1) suatu semangat kebersamaan; (2) suatu perasaan akan adanya struktur kekuasaan yang bisa dipercaya; (3) suatu kesadaran bahwa saling manfaat timbul karena kebersamaan; dan (4) suatu semangat yang datang dari pengalaman bersama yang dijaga sebagai suatu seni.<sup>13</sup>

Pengertian Pemberdayaan menurut Undang-Undang NO 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 ayat 8 adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan itu adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat, menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

Pemberdayaan merupakan proses yang saling berhubungan, terdapat dua kunci yaitu yang *pertama* pemberian kewenangan dan *kedua* pengembangan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, proses yang saling berhubungan itu di titik beratkan kepada pemberian wewenang dan pengembangan kapasitas masyarakat agar terciptanya perubahan sosial yang menyeluruh.

Dengan *power* yang dimiliki seseorang diharapkan dapat mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengembangkan keterampilan dalam menemukan solusi atas masalah kehidupan. Dengan demikian,

---

<sup>13</sup>Randy R Wrihatnolo dan Rian Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, PT.Alex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm 180

pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses *sharing power*, peningkatan kemampuan, dan penetapan kewenangan. Pada hakekatnya, pemberdayaan dapat dilakukan secara internal dari dalam diri orang itu.<sup>14</sup>

Pada dasarnya hukum islam memberikan hak yang setara pada muslim laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan muslimah memiliki kemandirian dan identitas hukum, ekonomi dan spritual dan independen.<sup>15</sup>

Untuk masalah ekonomi, setidaknya ada tiga ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan dasar hak-hak ekonomi perempuan yaitu<sup>16</sup>: *pertama*, mengenai hak mahar/mas kawin:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*.QS. An.Ni<sup>3</sup>;

*Kedua*, mengenai hak waris<sup>17</sup>:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu/bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan) ”*QS.An.Nisa:7

<sup>14</sup>Siti Amanah & Nami Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan*, Hlm 2

<sup>15</sup>Nur Hidayah, *Reinteraksi Hak-Hak Ekonomi Perempuan*, Vol.XIV, No.1, 2014, Hlm 86

<sup>16</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, CV Diponegoro, 2006. Hlm 61

<sup>17</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, Hlm 62

Ketiga, mengenai hak bekerja dan memperoleh penghasilan<sup>18</sup>

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

*“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dari bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu) .QS. An.Nisa:32*

Dari ketiga ayat di atas kemudian hukum islam mengembangkan dan memberikan hak-hak kepemilikan properti untuk perempuan di beberapa bidang hukum, yaitu : hukum keluarga (perkawinan/mahar, kewarisan dan perwalian), hukum properti (hibah,wakaf) dan hukum ekonomi (hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan)<sup>19</sup>.

Inti dari definisi pemberdayaan dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya Nicollo Machiavelli, Thomas Hobbes, Jim Ife, Loekman Soetrisno, dll yaitu dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya memampukan dan mendirikan masyarakat, menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

Sedangkan yang berperan dalam pemberdayaan di jelaskan dalam UU No 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 8 yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah

<sup>18</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, Hlm 66

<sup>19</sup> Nur Hidayah, *Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan*, Hlm 86

daerah, dunia masyarakat untuk menumbuhkan iklim dan pengembangan UMKM. Sedangkan menurut Islam ada tiga landasan hak-hak ekonomi perempuan: (1) Mengenai hak mahar/mas kawin. (2) Mengenai hak waris. (3) Mengenai hak bekerja dan memperoleh penghasilan.

### 3. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered development*). Terkait dengan hal ini, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya<sup>20</sup>.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan yang memperoleh barang-barang dan jasa-jasa mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup>Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif*, Hlm 109

<sup>21</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT.Refika Aditama, 2014, Hlm 58

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi<sup>22</sup>:

- a. Kelompok secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Adapun tujuan Pemberdayaan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 5 adalah :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Jadi dapat disimpulkan tujuan pemberdayaan adalah untuk memotivasi, memperbaiki diri dan memfasilitasi orang-orang yang dalam lingkungan yang lemah atau kurang beruntung untuk mencapai tujuannya.

---

<sup>22</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Hlm 60



Sebelum memberdayakan orang lain, seyogyanya seseorang harus mampu memberdayakan diri sendiri dahulu. Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Kondisi tersebut sering juga disebut masyarakat kurang berdaya, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupannya tidak sejahtera<sup>23</sup>.

Melalui upaya pemberdayaan ini kelompok-kelompok lemah dan terpinggirkan menjalani proses perubahan diri untuk mampu merubah kondisi dan lingkungan sekitarnya menjadi lebih baik dan bermartabat yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan<sup>24</sup>.

Pada dasarnya pemberdayaan ekonomi ditujukan kepada orang atau kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber-sumber produktif, berpartisipasi dalam hal pembangunan. Unsur utama pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat.

---

<sup>23</sup>Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya*, Pustaka Pelajar, 2011, Hlm 88

<sup>24</sup>Nur Hidayah, *Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan*, Hlm 93

#### 4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi

Implementasi program yang sudah disusun tidak terlepas dari rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis. Apabila rencana-rencana tersebut berhasil dilaksanakan tentunya ada faktor yang menyebabkan rencana itu sukses dilaksanakan. Menurut Sujianto kunci keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, di antaranya : *pertama*, adanya keinginan masyarakat untuk mengubah nasibnya adalah kemauan yang muncul didalam diri masyarakat untuk keluar dari ketidakberdayaan ekonominya. *Kedua*, adanya dorongan dan dukungan pemerintah adalah motivasi yang diberikan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat bisa berdaya. *Ketiga*, adanya peranan seluruh komponen masyarakat adalah dukungan yang diberikan elit lokal bagi keberdayaan masyarakat.<sup>25</sup>

Faktor kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi ada tiga faktor penentu keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi Islam yaitu, adanya keinginan masyarakat, adanya dukungan dan dorongan Pemerintah, dan adanya peranan seluruh komponen masyarakat.

#### 5. Faktor-faktor Kegagalan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Proses implementasi tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian. Kegagalan proses implementasi yang dilakukan tidak terlepas dari kekurangan pihak pelaksana dalam mengimplementasikan atau pihak penerima yang tidak mampu melaksanakan program yang diberikan. Menurut *Lowe*, kegagalan implementasi program

---

<sup>25</sup>Eni Maryanti dan Zulkamaini, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 5 Nomor 1, 2014, Hlm 94

pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : *Pertama*, ketakutan (*fear*) yang merupakan rasa takut yang muncul dari masyarakat yang akan diberdayakan. *Kedua*, ketidaknyamanan (*role of clarity*) yang merupakan rasa tidak nyaman yang dialami oleh masyarakat yang akan diberdayakan, karena harus merubah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan. *Ketiga*, kecenderungan menggunakan kebijakan yang sama (*resistance to change*) yang merupakan kecenderungan pihak pemberdaya yang menggunakan cara yang sama dalam memberdayakan masyarakat pada setiap lokasi.<sup>26</sup>

Selain faktor-faktor keberhasilan, ternyata ada faktor-faktor lain yang menjadi faktor-faktor kegagalan yaitu ketakutan, ketidaknyamanan, kecenderungan menggunakan kebijakan yang sama.

## **6. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

Schuler Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Kedelapan indikator tersebut adalah<sup>27</sup>:

- a. Kebebasan mobilitas
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil
- c. Kemampuan membeli komoditas besar
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga

---

<sup>26</sup>Eni Maryanti dan Zulkamaini, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 5 Nomor 1, 2014, Hlm 95

<sup>27</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Hlm 64

- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga
- f. Kesadaran hukum dan politik
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Sedangkan indikator keberhasilan program pemberdayaan menurut Sumodiningrat yaitu<sup>28</sup>:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin;
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya;
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat;
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dapat disimpulkan dari indikator di atas bahwa yang di sebut dengan ekonomi masyarakat itu berdaya, jika masyarakat itu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri serta menolong masyarakat sekitarnya. Dapat dikatakan pemberdayaan itu berhasil jika terdapat 8 indikator sebagai berikut, kebebasan

---

<sup>28</sup>Jaenal Effendi & Wirawan, *Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat Infaq dan Sedekah*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol 1 No 2, 2013, Hlm 162

mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan membeli komoditas, terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga, kebebasan relatif, kesadaran hukum, keterlibatan dalam kampanye dan jaminan ekonomi terhadap keluarga.

## **7. Sistem Pemberdayaan Ekonomi**

Secara umum sistem pemberdayaan ekonomi menurut Mardi Yatmo Hutomo meliputi pendekatan, misalnya: (1) bantuan modal; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) Bantuan Pendampingan (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) Penguatan Kemitra Usaha.

### **a. Bantuan Modal**

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

### **b. Bantuan Pembangunan Perasarana**

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah.

Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

#### c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat.

#### d. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil

dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

Dengan demikian, pengertian pengembangan kelembagaan ekonomi, perlu didefinisikan kembali. Kalau pendekatan kelompok dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### e. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi give power to everybody. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Naskah No.20, Juni-Juli 2000, Hlm 8-9

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dan sukses jika memiliki sistem. Sistem yang digunakan yaitu meliputi, bantuan modal, bantuan pembangunan, bantuan pendampingan, penguatan pembangunan kemitraan, dan pengutatan kemitraan usaha.

## **B. Kerangka Berpikir**

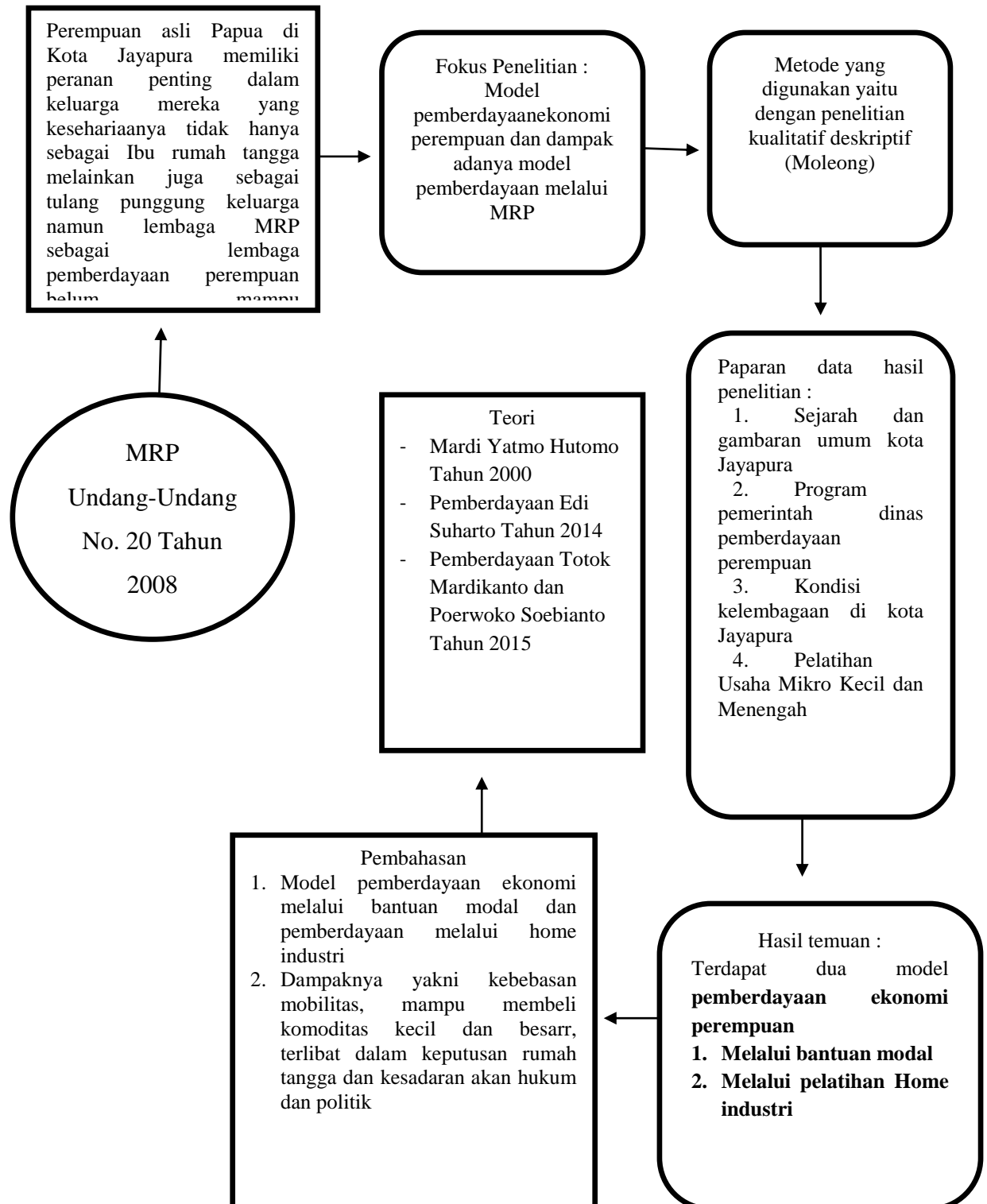
Kerangka berpikir menggambarkan alur pikir peneliti yang dimaksudkan untuk menyusun reka pemecahan masalah (jawaban pertanyaan-pertanyaan penelitian) berdasarkan teori yang dikaji<sup>30</sup>. Berdasarkan rumusan dan tujuan dalam penelitian, maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah Pascasarjana UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2015, Hlm 34



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



## **B AB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Subana dan Sudrajat dalam penelitian kualitatif berusaha menggambarkan dari gejala-gejala yang ada tanpa menerima<sup>32</sup>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi Kasus ialah metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan system”, baik itu berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat ataupun waktu. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Suatu kasus tidak dapat mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya berlaku bagi kasus yang diteliti. Karena tiap kasus bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain<sup>33</sup>.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan alasan, untuk memahami perspektif atau cara pandang melihat pemberdayaan ekonomi perempuan masyarakat asli Papua sehingga tercapai tujuan

---

<sup>31</sup>Bactiar S Bachri, *Menyakinkan Validitas Data Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No.1, April 2010, Hlm 50

<sup>32</sup>M Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung 2001, Hlm 15

<sup>33</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm 57

pemberdayaan perempuan asli Papua yang berdampak positif serta bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan berkeluarga. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan masyarakat perempuan asli Papua di Kota Kayapura dalam model pemberdayaan ekonomi perempuan melalui partisipasi masyarakat.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam Penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, instrumen utama dalam penelitian ini adalah: (1) Peneliti sendiri (2) pedoman wawancara (3) catatan lapangan dan (4) kamera. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan sebagai salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai partisipan, jadi dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara seksama sehingga mendapatkan data semaksimal mungkin<sup>34</sup>. Alasan pengamatan adalah sebagai berikut<sup>35</sup>:

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung.
2. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
3. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

---

<sup>34</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, Hlm 7

<sup>35</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014, Hlm 175

4. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti sehingga pengamatan secara langsung ini sangat diperlukan.
5. Teknik pengamatan secara langsung memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.

Peneliti selain berperan sebagai pengelola penelitian juga tidak dapat di gantikan oleh instrumen penelitian lainnya, sebagaimana yang dilakukan melalui kuesioner dan sebagainya. Keterlibatan peneliti sebagai instrumen utama merupakan kapasitas jiwa dan raganya ketika mengamati, bertanya, melacak, memahami dan kemudian mengabstraksikan, menjadi alat penting dalam proses penelitian<sup>36</sup>.

### C. Latar Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kawasan Kota Jayapura Provinsi Papua sebagai Ibu Kota Provinsi Papua. Kota Jayapura mempunyai luas 940 Km<sup>2</sup> (0,23% dari luas dataran Provinsi Papua), terletak di tepian Teluk Humbolt atau Yos Sudarso pada ketinggian 0 < 700 m di atas permukaan laut. Kota jayapura secara administrasi berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Laut Pasifik
Sebelah Selatan	: Kabupaten Keerom
Sebelah Timur	: Negara Papua New Guinea
Sebelah Barat	: Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.

---

<sup>36</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi*, CV.Alfabeta, 2008, Hlm 166

#### D. Data dan Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud data dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi dalam bentuk sifat yang tidak dapat diukur besar kecilnya. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh<sup>37</sup>.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dalam bentuk kualitatif yaitu data penjelasan dari sumber utama dan data konfirmasi dari pihak lain. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dapat berupa data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi<sup>38</sup>.

Ditinjau dari cara pemerolehannya, data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh, dikelola, dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama<sup>39</sup>. Dalam hal ini peneliti memperoleh hasil wawancara dari: Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Kepala dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (KB), masyarakat perempuan asli Papua, dan akademisi yang berkompeten dibidangnya.

Sumber kedua yaitu data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh, dikelola, dan disajikan oleh pihak lain dan biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal<sup>40</sup>. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dalam bentuk dokumentasi berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berasal dari lembaga Majelis Rakyat Papua, BPS Kota Jayapura dan dari kepala dinas pemberdayaan perempuan Kota Jayapura.

---

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, PT. Renika Cipta, Jakarta, Hlm 107

<sup>38</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 188

<sup>39</sup>Nawawi, Hadari dan Mimi Martiwi, *Penelitian Terapan*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 107

<sup>40</sup>Nawawi, Hadari dan Mimi Martiwi, *Penelitian Terapan*, Hlm 107

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga cara yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan dari teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Wawancara Mendalam

Dalam bentuk wawancara mendalam, wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan dapat dilakukan berulang pada informan yang sama<sup>41</sup>. Dalam hal ini, narasumber menceritakan seluruh kegiatannya dan peneliti membuat garis besar pokok-pokok yang ditanyakan. Pelaksanaan wawancara dan urutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan narasumber. Dalam wawancara peneliti ini hanya sebatas permasalahan dalam penelitian sehingga informasi dan data-data yang didapat semakin terperinci dan mendalam. Adapun panduan wawancara yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Panduan Wawancara**

<b>Informan</b>	<b>Konteks</b>
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP)	1. Sejarah dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) 2. Bentuk Kegiatan masyarakat asli Papua 3. Mekanisme pemberdayaan perempuan asli Papua 4. Tugas MRP
Mama-mama Asli Papua	1. Implementasi penerapan pemberdayaan 2. Pengaruh model pemberdayaan terhadap masyarakat perempuan asli Papua
Pemerintah/ Kepala	1. Kebijakan Pemerintah Kota

<sup>41</sup>Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002, Hlm 132

DinasPemberdayaan Perempuan Kota Jayapura	Jayapura dalam pemberdayaan perempuan 2. Pandangan pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua 3. Keadaan perekonomian masyarakat asli Papua
--	--

## 2. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang bearti memperhatikan dan mengikuti, memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis secara perilaku yang dituju. Menurut Cartwright yang dikutip dalam Haris Herdiansyah mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu<sup>42</sup>.

Dalam penelitian ini, peneliti langsung turun ke lapangan mengamati perilaku dan aktivitas masyarakat di lokasi penelitian. Adapun hal-hal yang peneliti amati adalah :

**Tabel 3.2 Model Observasi**

<b>Kondisi yang diamati</b>	<b>Konteks</b>
Model pemberdayaan Ekonomi	Untuk memperoleh data tentang model pemberdayaan ekonomi yang ada pada masyarakat perempuan asli Papua
Penduduk perempuan asli Papua	Untuk memperoleh data tentang kegiatan masyarakat perempuan asli Papua dan keadaan ekonomi penduduk setempat
Majelis Rakyat Papua (MRP)	Untuk melihat dan memperoleh data tentang program pemberdayaan perempuan asli Papua

<sup>42</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, Hlm 131

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh suatu gambaran atau Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi, berdasarkan beberapa pandangan pakar penelitian kualitatif, dokumentasi dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa masa lalu, baik yang di persiapkan maupun yang tidak persiapkan untuk suatu peneliti<sup>43</sup>.

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dalam bentuk dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan yang peneliti teliti yang diambil peneliti sebagai data berupa file, gambar-gambar, catatan yang berasal dari Majelis Rakyat Papua, BPS Kota Jayapura dan Dinas pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini peneliti memperoleh data-data tentang latar belakang terbentuknya lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), struktur organisasi dan tugas Majelis Rakyat Papua, data-data kegiatan ekonomi masyarakat perempuan asli Papua yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan Kota Jayapura.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja<sup>44</sup>. Analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan<sup>45</sup>. Dalam teknik ini peneliti

---

<sup>43</sup>M.Djunaidi, Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, 2014, Hlm 199

<sup>44</sup>M. Djunaidi, Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian*, Hlm 285

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm 246



menganalisis data-data penelitian. Sehingga dalam penelitian ini peneliti memperoleh data terkait model pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut<sup>46</sup> :

- a. Tahap reduksi data merupakan upaya peneliti dengan jalan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan dari transformasi data besar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data berupa dokumentasi, observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa informan, setelah semuanya terkumpul peneliti melakukan analisis sekaligus memilih mana data yang diperlukan dan mana yang tidak sehingga dalam penelitian memperoleh data yang akurat terkait dengan model pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua.
- b. Tahap penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang sudah direduksi. Pada tahap ini peneliti menyusun data terkait model pemberdayaan ekonomi perempuan asli guna memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan dari data penelitian.
- c. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung. Pada

---

<sup>46</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Hlm 248

tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya. Dengan kata lain makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya.

Teknik pemeriksaan data dalam kriteria derajat kepercayaan, teknik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut<sup>47</sup> :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil pengamatan di lapangan dengan hasil wawancara terkait pemberdayaan perempuan asli Papua, sehingga dapat menemukan hasil temuan yang tepat.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian. Tahap ini peneliti membandingkan yang dikatakan masyarakat sekitar dengan yang peneliti dengar sepanjang penelitian, peneliti kumpulkan dan peneliti simpulkan sehingga mendapat jawaban yang sinkron dengan kebenarannya.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua.

---

<sup>47</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hlm 178

### G. Pengecekan Keabsahan Data

Yang dimaksud dengan Keabsahan data adalah jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Untuk itu ada beberapa kriteria yang digunakan menyakinkan bahwa data hasil penelitian kualitatif yang diperoleh di lokasi penelitian betul-betul akurat dan dapat dipercaya. Keabsahan data dari data hasil penelitian kualitatif, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut<sup>48</sup>:

- a. Menunjukkan atau mendemonstrasikan nilai yang benar.
- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan dan
- c. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Sedangkan dalam pemeriksaan keabsahan data hal yang perlu dilakukan adalah<sup>49</sup>:

- a. Perpanjangan keikutsertaan, ini adalah tahap awal peneliti memasuki lapangan. Berapa lama perpanjangan keikutsertaan ini dilakukan akan sangat bergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data yang peneliti peroleh. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian selama kurang lebih 6 bulan dengan 10 kali kedatangan untuk menggali informasi yang ada di kantor lembaga Majelis Rakyat Papua, Kantor dinas pemberdayaan perempuan maupun informasi yang di pasar mama-mama Papua.
- b. Ketekunan pengamatan triangulasi, tahap ini dapat peneliti lakukan dengan terus menggali informasi melalui buku, hasil penelitian, atau dokumentasi

---

<sup>48</sup>M.Djunaidi, Ghony Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian*, Hlm 315

<sup>49</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Hlm 370

lainnya yang terkait dengan model pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua. Dalam hal ini, peneliti menggunakan data yang berasal dari berbagai sumber dari internet, surat kabar, buku-buku, dan beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Kajian kasus negatif, dalam tahap ini peneliti mencari data yang berbeda bahkan yang bertentangan dengan data yang diperoleh. Bila tidak ditemukan lagi kasus negatif, berarti data yang diperoleh sudah dapat dipercaya. Dalam penelitian ini peneliti, peneliti tidak menemukan perbedaan yang besar antara data yang peneliti dapatkan di lapangan.
- d. Pengecekan anggota, yakni proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan (pemberi data). Setelah data penelitian disepakati oleh para informan, maka peneliti perlu membuat semacam pengesahan yang ditandatangani oleh para informan.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

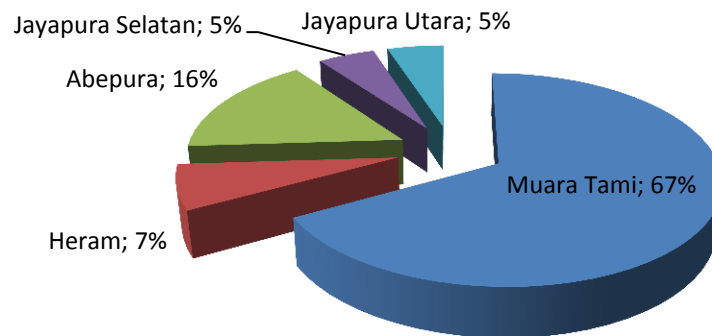
##### **1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Kota Jayapura**

Kota Jayapura nama awalnya adalah Numbay, kemudian jaman Pemerintahan Hindia Belanda nama tersebut diganti dengan Hollandia berasal dari Bahasa Belanda dari kata Holl = Lengkung, teluk, Land = tanah, tempat yang bearti tanah yang melengkung atau tempat/teluk yang berteluk. Jadi Hollandia artinya tanah yang melengkung atau tempat/teluk yang berteluk. Konon Geografis Kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai utara negeri Belanda berteluk-teluk. Kondisi alam yang berlekuk-lekuk inilah mengilhami Kapten Sache untuk mengganti nama Numbay menjadi Hollandia pada tanggal 7 Maret 1910. Kini Kota Jayapura telah berganti nama beberapa kali : Numbay- Hollandia- Kota Baru- Sukarnapura- Jayapura, yang sekarang dipakai adalah “Jayapura”.

Kota Jayapura berdiri sejak tanggal 21 September 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993. Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua yang terletak antara  $137^{\circ} 27^1$ - $141^{\circ} 41^1$  Bujur timur dan  $1^{\circ} 27^1$ -  $3^{\circ} 49^1$  Lintang selatan. Kota Jayapura memiliki luas  $940 \text{ Km}^2$  atau 0,30 persen dari luas wilayah Provinsi Papua dan merupakan daerah terkecil di Provinsi Papua, namun dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 wilayah perairan telah menjadi milik 6 mil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 dengan demikian luas kota bisa menjadi +1.000 Km. Kota Jayapura terdiri dari 5 (Lima)

Wilayah distrik yaitu<sup>50</sup>: Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami, yang terbagi lagi dalam 25 Kelurahan dan 14 Kampung.

Gambar 4.1  
Luas Wilayah Menurut Distrik di Kota Jayapura



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2016.  
Kota Jayapura Dalam Angka 2016*

Dari gambaran luas menurut Distrik di atas, Distrik Muara Tami memiliki Luas Wilayah Paling Luas dengan Luas mencapai 626,7 Km<sup>2</sup>, dan wilayah Distrik terkecil yaitu Distrik Jayapura Utara dengan luas wilayah 43,4 Km<sup>2</sup> atau hanya 4,62 persen dari total luas Kota Jayapura.

Tabel 4.1  
Wilayah Kampung Menurut Distrik di Kota Jayapura

No	Distrik	Kampung	Kelurahan
1.	Jayapura Utara	1. Kayu Batu	1. Gurabesi 2. Bayangkara 3. Trikora 4. Imbi 5. Tanjung Ria 6. Mandala

<sup>50</sup>BPS Kota Jayapura, *Gambaran Umum Kondisi Kota Jayapura dalam angka 2016*

			7. Angkasapura
2.	Jayapura Selatan	1. Tahima Soroma 2. Tobati	1. Argapura 2. Ardipura 3. Numbay 4. Entrop 5. Hamadi
3.	Abepura	1. Nafri 2. Enggros 3. Koya Koso	1. Asano 2. Awiyo 3. Abepantai 4. Yobe 5. Kota Baru 6. Wahno 7. Way Mhorock 8. Vim
4.	Muara Tami	1. Koya timur 2. Koya barat	1. Skouw Mabo 2. Skouw Yambe 3. Skouw Sae 4. Koya Tengah 5. Holtekamp 6. Mosso
5.	Heram	1. Yoka 2. Waena Kampung	1. Hedam 2. Waena 3. Yabansai

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura dalam angka 2016*

Topografi daerah Kota Jayapura cukup bervariasi, mulai dari daratan sampai berbukit-bukit/pegunungan, dimana terdapat kurang lebih 84% daerah yang tidak layak huni (non budidaya) terdiri dari perbukitan terjal dengan kemiringan di atas 40, rawa-rawa berstatus konservasi atau hutan lindung. Kota Jayapura berada di atas ketinggian 0-700 M di atas permukaan laut. Daerah layak huni kurang lebih 40% dan sebagian besar hamparan berada di Distrik Muara Tami yang berbatasan langsung dengan Negara PNG.

Jumlah penduduk Kota Jayapura tahun 2016 menurut BPS mencapai 275,694 jiwa, dan merupakan terpadat di Provinsi Papua. Terdiri dari 145.140

jiwa laki-laki dan 130.554 jiwa penduduk perempuan. Jumlah rumah tangga di Kota Jayapura pada tahun 2015 mencapai 65.025 rumah tangga.

Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	15.109	13.888	28.997
5-9	13.956	13.189	27.145
10-14	12.505	11.544	24.049
15-19	12.892	12.001	24.893
20-24	17.957	15.810	33.767
25-29	16.785	14.679	31.464
30-34	14.115	12.334	26.449
35-39	11.017	10.038	21.055
40-44	9.438	8.400	17.838
45-49	7.176	6.051	13.227
50-54	4.955	4.302	9.257
55-59	3.351	2.771	6.122
60-64	2.266	1.718	3.984
65+	2.326	1.971	4.297
<b>Jumlah</b>	<b>143.848</b>	<b>128.696</b>	<b>272.544</b>

*Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2016*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah jiwa terbanyak laki-laki dan perempuan yang berusia produktif antara lain usia 20-24 tahun sebanyak 33.767 orang, usia 25-29 tahun sebanyak 31.464 orang. Sedangkan jumlah jiwa yang paling sedikit yang berusia lansia yaitu 60-65+ tahun sebanyak 3.984 orang.

Adapun hasil pembangunan yang dicapai selama 5 tahun terakhir di Kota Jayapura menunjukkan hasil yang terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan berbagai sektor, seperti sektor jasa dan perdagangan, pariwisata, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan lain-lain. Kota Jayapura dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 25,75% meningkat dibandingkan 5 tahun sebelumnya sebesar 22,19% per tahun.



Pertumbuhan tersebut masih bisa dipacu lebih meningkat lagi ke depannya, karena potensi Jayapura selain sebagai Pusat Pemerintahan juga sebagai Kota Pendidikan, Kota Jasa Perdagangan dan Kota Pariwisata.

Di sektor Pariwisata misalnya Kota Jayapura memiliki beberapa wisata alam, wisata budaya dan sejarah diantaranya adalah Pantai Base-G, Pantai Holtekam, Pantai Hamadi, Museum Waena dan lokal Budaya, Kolam Pemancingan di Koya Barat dan Koya Timur, Peternakan Buaya, Teluk Youtefa dan Skyline, Tugu Jepang di Abepantai, Industri Batik Khas Papua dan Wisata Alam Gunung Cyclop. Potensi ini bisa dikemas menjadi wisata kota atau City Toursm.

## **2. Program Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Jayapura**

Badan Pemberdayaan Perempuan di Kota Jayapura mempunyai tugas melakukan urusan pemberdayaan perempuan, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Badan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas yaitu, perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pelaksanaan tata usaha dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kota Jayapura termasuk daerah di Provinsi Papua dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi kota

Jayapura mencapai 12,28%. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2015 mencapai 46,54% atau pendapatan perkapita mencapai Rp.12.684.344,-. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 126.424.200,-. Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2016 mencapai Rp. 1.057.945.378.760,-.<sup>51</sup>

Menurut Ibu Betty Anthoneta Puy, SE.MPA kepala dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga bencana saat di temui di kantor walikota Jayapura dalam wawancaranya, beliau mengatakan untuk sejarah pemberdayaan sejak awal tahun 2005 bergabung dalam pemerintahan setelah melaksanakan tugasnya sebagai lurah selama 4 tahun, sejak itulah berinisiatif untuk membentuk kampung-kampung adat ikatan perempuan adat, menurutnya ini merupakan satu hal yang ada di Kota Jayapura yang mulai tergeser karna globalisasi, sehingga istri seorang ondoafi yang ada di kampungnya itu mulai tergeser oleh arus keluar masuknya warga dari kota Jayapura. Oleh karena itulah di bentuk suatu ikatan perempuan adat yang tujuannya untuk menaungi perempuan-perempuan asli Papua di kampungnya untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan kota Jayapura.

Penduduk Asli di wilayah kota Jayapura dan juga wilayah-wilayah lain di tanah Papua masih cukup kuat sistem lembaga adat, seperti masih adanya Heru Hray, Charsoric, Ontofro, Kebari dan Ondofolo. Disamping itu masih ada kepemimpinan lain yang dikenal melalui hukum positif yaitu kepala kampung.

Sebagaimana adanya undang-undang otsus No.21 tahun 2001 tentang pemberdayaan perempuan Papua, maka perempuan Papua tidak hanya berprofesi

---

<sup>51</sup>BPS Kota Jayapura dalam angka 2016

sebagai petani atau pedagang melainkan bisa ikut serta andil dalam lingkungan pemerintahan Kota Jayapura. Sejak itulah masyarakat Papua dan perempuan Papua mengambil bagian dalam pembangunan di Kota Jayapura.

Pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Jayapura menurut suku Port Numbay (Asli Papua), Papua Non Numbay dan Non Papua dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3  
Pegawai Menurut Suku

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Papua Port Numbay	209	188	397
2	Papua Non Port Numbay	730	718	1,448
3	Non Papua	1,060	2,006	3,066
		<b>1,999</b>	<b>2,912</b>	<b>4,911</b>

*Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2016*

Dari tabel di atas masih terlihat bahwa pegawai di lingkungan kantor Pemerintahan Kota Jayapura lebih didominasi oleh suku-suku dari luar Papua. Sedangkan suku-suku dari Papua Non Port Numbay jumlah laki-laki 730 orang dan perempuan 718 orang dan yang berasal dari suku Port Numbay sendiri jumlah laki-laki 209 orang dan perempuan 188 orang.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua dengan segala pembangunan yang dilakukan, Kota Jayapura menjadi “*magnet*” bagi suku-suku dari wilayah lain di Indonesia. Sebagaimana realita yang terjadi di Papua kaum perempuan khususnya di Papua harus mempunyai pemahaman budaya lokal mereka harus memiliki dan memahaminya serta pemerintah harus mengetahui apa-apa yang menjadi kebutuhan perempuan Papua, jika ini tidak dilakukan akan selalu ada masalah yang timbul dan pendidikan adalah kunci untuk pemberdayaan perempuan dan

peraturan adat haruslah menguntungkan perempuan dan pandang bulu. Pendidikan, pelatihan dan bimbingan semacamnya harus menjadi rekomendasi dari setiap program pemerintah untuk penguatan dan pengetahuan bagi kaum perempuan.

## **B. Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Papua Melalui Majelis Rakyat Papua (MRP)**

### **1. Kondisi Kelembagaan di Kota Jayapura**

Saat gejolak reformasi total terjadi di Indonesia awal 1998 yang berujung pada lengsernya Presiden RI Soeharto dari tampuk kekuasaan, pada 23 Mei 1998, di Papua juga terjadi gejolak sosial dan politik yang luar biasa. Gejolak sosial dan politik terjadi secara serentak di seluruh wilayah di Papua. Seperti menuntut penyelesaian kasus pelanggaran hak azasi manusia, peninjauan ulang pelaksanaan penuntutan pendapatan rakyat (Pepera) sampai dengan penentuan nasib sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, situasi sosial politik di Papua mengalami pasang surut, terutama dalam kurun waktu 1998 sampai 2005. Suatu kurun waktu yang menghadapkan rakyat Papua hidup dalam ketidakpastian<sup>52</sup>.

Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irianjaya sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2.

---

<sup>52</sup>Paskalis Keagop dkk, *Rekam Jejak Majelis Rakyat Papua 2010-2015*, Suara Perempuan Papua, Jayapura 2010

Otonomi Khusus bagi provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui proses dan perjuangan yang panjang akhirnya UU No. 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua disahkan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, pada 21 November 2001<sup>53</sup>.

Di temui dalam kantornya Kabag persidangan Majelis Rakyat Papua (MRP) Bapak Taniel Feri SH, beliau mengatakan bahwa MRP lahir karena Undang-Undang Otsus, seandainya tidak ada MRP maka tidak ada akan ada pengawasan, karena dalam Majelis Rakyat Papua ada tiga (3) yang terlibat yaitu Agama, Adat dan Perempuan.

Lembaga MRP itu dianggap penting untuk ada di Papua, karena sejak Papua menjadi wilayah Indonesia sampai dengan hari ini. Orang Papua tidak pernah atau sulit untuk mengaktualisasikan diri ataupun menduduki jabatan-jabatan politik penting dalam pemerintahan. Misalnya menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, menjadi bupati, gubernur, atau jabatan-jabatan strategis lainnya.

---

<sup>53</sup>Paskalis Keagop dkk, *Rekam Jejak Majelis Rakyat Papua 2010-2015*, Suara Perempuan Papua, Jayapura 2010

Secara sistematis selama ini orang Papua diletakan dalam posisi yang paling lemah dengan stigma belum mampu. Akhirnya mereka kehilangan percaya diri dan tidak bisa ikut bersaing dalam berbagai peluang. Hanya orang-orang dari suku-suku tertentu di Indonesia yang mendominasi berbagai jabatan penting pemerintahan di Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) hadir untuk memberikan kemampuan bagi orang asli Papua dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Indonesia dan juga Papua. Sejarah Berdirinya Majelis Rakyat Papua (MRP)<sup>54</sup>.

a. Dasar berdirinya Majelis Rakyat Papua (MRP) :

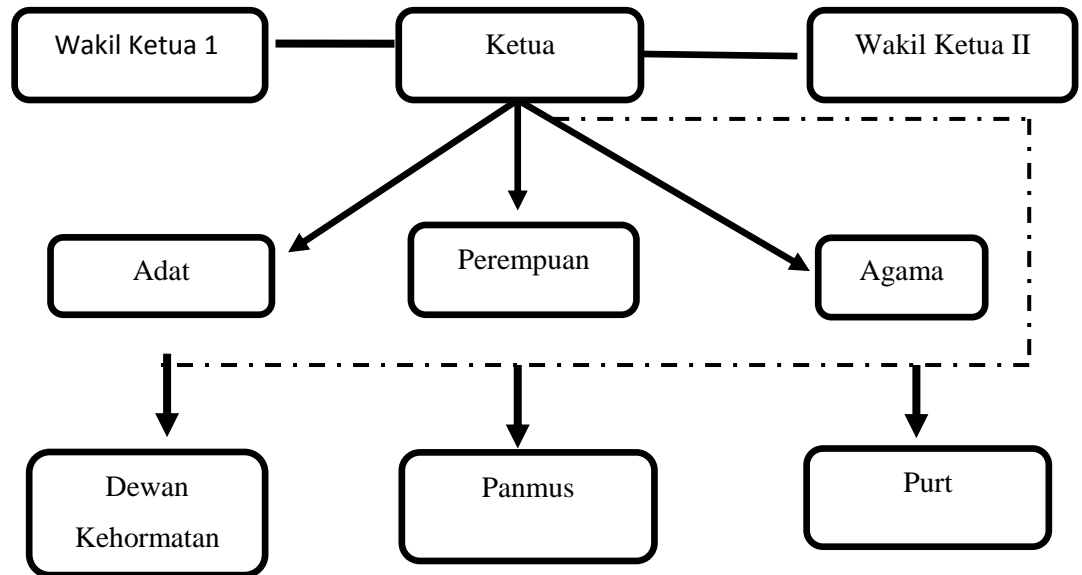
- 1). UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Provinsi Papua.
- 2). Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2005.
- 3). Peraturan Gubernur Papua Nomor 58 Tahun 2015.
- 4). Berdiri pada tanggal 31 Oktober 2005

---

<sup>54</sup>Pergub Prov. Papua Nomor 58 Tahun 2015

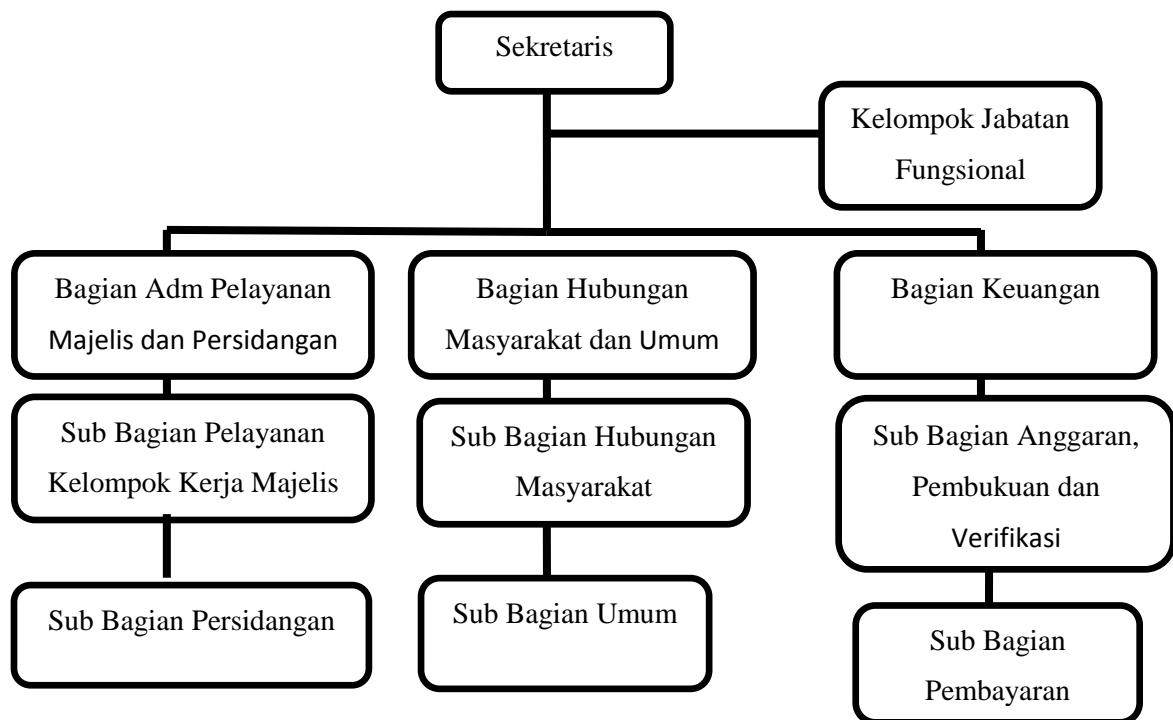
b. Struktur Organisasi :

1). Lembaga MRP



Sumber: *Sekretariat Majelis Rakyat Papua*

2). Struktur Organisasi Sekretariat MRP



Sumber: *Sekretariat Majelis Rakyat Papua*

Jumlah Pegawai dan Anggota pada lembaga MRP sesuai daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat MRP adalah :

c. Anggota MRP :

- a. Pokja Adat : 8 orang
- b. Pokja Agama : 10 orang
- c. Pokja Perempuan : 13 orang

d. Sekretariat MRP :

- a. Bagian Adm. Pel. Majelis dan Persidangan : 20 orang
- b. Bagian hubungan Masyarakat dan Umum : 21 orang
- c. Bagian Keuangan : 17 orang
- d. Bagian umum : 60 Orang

Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah representasi kultur orang asli Papua, memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama (BAB I, Pasal I ayat (5) Perda no.5 tahun 2005). Tugas Majelis Rakyat Papua (MRP) itu sendiri yaitu<sup>55</sup>:

- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua yang diusulkan oleh DPR Papua.

---

<sup>55</sup>Pergub Provinsi Papua No.58 Tahun 2015



- b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRP.
- c. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan gubernur.
- d. Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada DPRP, gubernur, DPRD, Kabupaten/ Kota serta bupati/ walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Adapun nilai-nilai Organisasi dari kode etik PNS sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan

- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintah
- f. Menjaga kerahasiaan yang berhubungan dengan kebijakan negara
- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab efektif dan efisien
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.

## **2. Program Pemerintah Terhadap Masyarakat Perempuan Papua**

Melalui kebijakan pemerintah Kota Jayapura, mereka berupaya untuk mendukung sepenuhnya meningkatkan perekonomian khususnya perempuan asli Papua. Beberapa program penting dilaksanakan dari segi pembangunan hingga pelatihan-pelatihan dengan objek para perempuan asli Papua. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, terdapat beberapa program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat perempuan Papua yaitu:

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pengamatan awal yang peneliti lakukan adalah dengan cara peneliti berkeliling-keliling pasar dan melihat-lihat keadaan pasar, melihat para pedagang yang sedang menyiapkan dagangannya dan menyajikan barang dagangannya yang siap untuk di jual. Sambil mengelilingi pasar peneliti mengambil gambar, peneliti juga memastikan informan yang bisa untuk diwawancarai.

Gambar 4.2 Pasar Sementara Mama-Mama Papua



*Sumber: Observasi Peneliti*

Salah satu lokasi penelitian peneliti yaitu di pasar mama-mama Papua yang berada di pusat ibu Kota Jayapura. Keberadaan pasar sementara mama-mama Papua ini merupakan salah satu sumber peningkatan perekonomian Kota Jayapura. Berdasarkan pengamatan peneliti, mayoritas masyarakat perempuan asli Papua atau yang biasa di sebut mama-mama Papua sebagian besar menggantungkan hidup di pasar sementara mama-mama Papua. Di pasar sementara mama-mama Papua yang di sediakan oleh pemerintah kota Jayapura inilah perempuan asli Papua melakukan kegiatan jual-beli. Di pasar ini semua di lakukan secara tradisional, seperti pada umumnya pasar tradisional yang memiliki tempat berdagang yang bau, pengap, becek dan jorok bisa dibayangkan ketika

musim hujan tiba pasti akan becek dengan genangan air hampir di seluruh area pasar. Demikian juga yang terjadi di pasar sementara mama-mama Papua.

Dari kondisi ini maka pemerintah Kota Jayapura membuat kebijakan untuk melakukan penataan pasar sementara mama-mama Papua dengan cara membangun pasar mama-mama Papua yang berkonsep modern, namun untuk saat ini pasar belum di gunakan karena masih dalam tahap pembangunan.

Gambar 4.3  
Pasar Mama-mama Papua dalam tahap pembangunan



*Sumber: Observasi Peneliti*

Di pasar sementara mama-mama Papua, peneliti mendapati sebagian pedagang perempuan asli Papua memilih tempat jualan dengan cara menempati lahan yang ada di pinggiran pasar yang dianggap tepat untuk menggelar barang dagangannya, bahkan sebagian besar dari pedagang perempuan asli Papua menggelarkan barang dagangannya di bawah tanah beralas karung dan di ruang terbuka tanpa atap yang berhubungan dengan cuaca panas maupun hujan. Hal ini seperti yang dikatakan ibu Salomina dalam wawancaranya sebagai berikut<sup>56</sup>:

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan masyarakat pedagang di pasar mama-mama Papua Ibu Salomina, 17 Mei 2017 di pasar mama-mama Papua

“Iya mama sudah lama jualan di sini, kalo di sinikan rame, dorang yang datang belanja bisa langsung lihat mama pu jualan, kalo di bagian dalam-dalam sepi jadi banyak yang tidak laku”

Menurut Ibu Salomina dengan menempati lahan kosong yang ada pinggiran pasar akan banyak pembeli yang dapat langsung melihat barang dagangannya dengan alasan di pinggiran pasar adalah tempat yang mudah untuk di jangkau para pembeli. Namun ketika cuaca hujan mereka harus memindahkan barang jualan mereka atau hanya menutupnya dengan karung. Selain itu para pedagang mama-mama Papua hanya berjualan barang dagangan dari hasil berkebun mereka sendiri.

Gambar 4.4 Mama-mama Papua yang menggelar barang dagangannya



Sumber: *Observasi Peneliti*

#### b. Pemberian Modal

Program ini merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat perempuan papua dengan cara memberikan bantuan modal terhadap mereka. Bantuan dari pemerintah untuk para pedagang mama-mama asli Papua dalam menunjang proses kegiatan jual beli di pasar mama-mama Papua menjadi harapan besar bagi mama-mama asli Papua. Namun perhatian pemerintah berupa bantuan untuk mama-mama asli Papua masih belum merata dan tidak

menyeluruh pada kebutuhan pedagang mama-mama asli Papua. Seperti yang di katakan mama Nelly Yoku dalam wawancaranya sebagai berikut<sup>57</sup>:

“Mama pernah satu kali dapat kasih dari pemerintah, dorang datang kasih mama 500 ribu, tapi ya itu cuma satu kali saja tidak setiap tahun mama di kasih, mama putar uang itu buat tambah-tambah dagangan mama.”

Hal ini sama seperti yang di katakan Ibu Dra.Maria Nere selaku kepala bagian pemberdayaan ekonomi perempuan saat di temui dalam kantornya mengatakan bahwa<sup>58</sup>:

“Masalah bantuan untuk perempuan asli Papua itu memang ada, lima kampung yang ada di Kota Jayapura kita kasih perorang 500 ribu sesuai dengan anggaran yang tersedia yang mana di peruntukkan untuk penambahan modal jualan mereka, mereka kami bantu melalui dana otsus, agar perempuan asli Papua tidak monoton jualannya, namun untuk pembagiannya kita gilir setiap tahunnya”

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa memang untuk bantuan modal itu sendiri tidak diberi setiap tahunnya kepada mama-mama asli Papua tersebut, akan tetapi diberikannya secara bergilir dari 5 distrik yang ada di Kota Jayapura.

### **3. Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Ibu Dra. Maria Nere kepala bagian pemberdayaan perempuan Kota Jayapura, pembangunan pemberdayaan perempuan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kemandirian perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, supaya perempuan Papua mampu berperan dalam semua aspek kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang.

---

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan pedagang di pasar mama-mama Papua Ibu Nelly Yoku, 20 Mei 2017 di pasar mama-mama Papua

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan Kepala bagian pemberdayaan perempuan Ibu Maria Nere, 15 Mei 2017 di kantor walikota Jayapura

Berwirausaha bagi masyarakat khususnya bagi perempuan, tidak muncul begitu saja dan bahkan tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk berwiraswasta melainkan melalui proses pembelajaran dan pengalaman yang cukup, salah satu cara mengembangkan jiwa wirausaha adalah melalui kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan asli Papua dalam menopang ekonomi keluarga. Jadi peran perempuan dalam menopang ekonomi keluarga tidak dapat dianggap sepele, karena berbagai fakta menunjukkan sudah banyak kaum perempuan yang termotivasi untuk berwirausaha demi meningkatkan ekonomi keluarga. Untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengisi pembangunan dan menumbuhkan jiwa wirausaha bagi kaum perempuan asli Papua, maka badan pemberdayaan Kota Jayapura melaksanakan pelatihan usaha bagi perempuan, kelompok usaha perempuan yang ada di 5 (lima) distrik Kota Jayapura.

Pelatihan yang di khususkan untk perempuan asli Papua ini di programkan oleh dinas pemberdayaan perempuan Kota Jayapura, yang mana dari setiap distrik di kelompokkan terdiri dari beberapa kelompok. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pembinaan. Proses pelatihan sendiri dilaksanakan pada aula kantor walikota yang dipimpin langsung oleh ibu-ibu dinas pemberdayaan perempuan dan ibu-ibu yang berkompeten dibidangnya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pelatihan keterampilan

Menurut ibu Dra. Maria Nere, pelatihan keterampilan ini bertujuan untuk melatih perempuan Papua untuk menciptakan kreasi-kreasi di samping itu

perempuan Papua juga bisa mendapatkan penghasilan dari keterampilan di luar dari berdagang.

Gambar 4.5

Pembukaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Tahun 2016



Sumber: Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan

Pelatihan keterampilan yang dimaksud ini adalah pelatihan pembuatan noken (tas khas Papua). Noken itu sendiri menurutnya dahulu kala apabila seorang perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka ia dikatakan belum dewasa sehingga tidak boleh menikah. Berikut pernyataan beliau<sup>59</sup>:

“Iya mas, perempuan Papua kalo belum bisa buat noken belum bisa dikatakan dewasa, namun seiring dengan perkembangan zaman, perempuan Papua banyak yang tidak berminat untuk buat noken dengan alasan rumit buatnya dan juga susah dalam segi pemasarannya”

Hal itu sama seperti yang di katakan mama Yenni, salah satu pembuat dan penjual tas noken mengatakan bahwa dalam pemasaran noken (tas khas papua) banyak kendala yang di alami. Berikut pernyataanya<sup>60</sup>:

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Maria Nere

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yenni masyarakat asli Papua, 28 Mei 2017



“Biasa kalo ada yang pesan baru mama buatkan, karna kalo tidak begitu tinggal tatumpuk saja tidak laku, sepi peminatnya to, karna orang Papua bisa buat sendiri jadi tidak beli, kecuali kalo ada festival-festival itu baru mama buat banyak, karna banyak orang dari luar daerah yang datang lihat”

Peneliti sering mendapati mama-mama Papua atau masyarakat Papua memiliki alat gendong noken dengan bahan dasar serat. Peneliti pernah bertanya kepada warga yang mana juga teman peneliti sendiri sewaktu duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sedang menggunakan noken “Dimana membeli noken” teman peneliti menjawab bahwa noken tersebut mereka buat sendiri. Konon sejak lahir hingga mati, noken memiliki arti penting bagi masyarakat Papua. Saat bayi noken digunakan sebagai alat gendong, ketika menginjak remaja noken dibuat untuk oleh gadis untuk calon pasangannya, begitu pula ketika seorang meninggal, tulang belulanganya disimpan di dalam noken.

Noken adalah sebuah tas yang digunakan oleh masyarakat Papua untuk membawa kebutuhan sehari-hari, bahkan digunakan untuk menggendong bayi. Bagi anak sekolah, noken bisa digunakan sebagai pengganti tas untuk membawa buku ke sekolah. Noken terbuat dari kulit kayu, kulit atau kulit batang anggrek, seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini noken banyak di buat dari benang. Cara penggunaannya pun sangat unik yaitu diletakkan di kepala.

#### b. Pelatihan pembuatan bakso ikan

Pelatihan keterampilan lainnya yang di programkan dinas pemberdayaan perempuan yaitu pembuatan bakso ikan, tujuan dari adanya pelatihan pembuatan bakso ikan ini adalah melatih mama-mama asli Papua supaya bisa juga membuat

bakso dan mampu bersaing dengan para pendatang. Berikut wawancara bersama Ibu kepala bagian pemberdayaan perempuan<sup>61</sup>:

“Iya ade, mama-mama ini kita latih cara membuat bakso ikan, tujuannya supaya mereka juga bisa membuat dan berjualan bakso, jangan hanya para pendatang saja yang jualan bakso, di tanah kita ini kita tunjukkan kalo mama-mama Papua ini juga mampu dan bisa seperti para pendatang”

Pelatihan keterampilan pembuatan bakso itu sendiri di lakukan di kelurahan hamadi dengan di ikuti oleh kelompok usaha perempuan dari 5 distrik yang ada di Kota Jayapura. Namun sangat di sayangkan dengan di adakannya pelatihan keterampilan pembuatan bakso ini peneliti melihat belum ada masyarakat perempuan asli Papua atau mama-mama Papua yang membuka warung atau berjualan bakso ikan itu sendiri. Peneliti hanya masih sering menjumpai masyarakat pendatang saja yang berjualan.

Gambar 4.6

Pembukaan pelatihan pembuatan bakso ikan



*Sumber: Hasil Observasi Peneliti*

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Ibu kepala bagian pemberdayaan perempuan Ibu Maria Nere, 15 Mei 2017

#### 4. Hasil Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data di atas peneliti menemukan beberapa model yang ada dalam pemberdayaan masyarakat perempuan papua *Pertama*, peran organisasi lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat perempuan papua adalah sebagai perancang dan pemberi masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan mereka terhadap pemberdayaan masyarakat perempuan asli papua. Adapun sebagai pelaksanaan program tersebut adalah dinas pemberdayaan perempuan Kota Jayapura.

*Kedua*, bantuan modal dari pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perempuan asli Papua yaitu dengan memberikan bantuan modal untuk menunjang proses kegiatan jual beli mereka di pasar. Bantuan modal usaha kepada pedagang mama-mama asli Papua ini merupakan kewajiban pemerintah sebagai upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan adanya bantuan dari pemerintah ini mama-mama asli Papua dapat bersaing dengan para pendatang yang mana notabenenya masyarakat para pendatang menjual bermacam-macam barang dagangan.

*Ketiga*, model pemberdayaan ekonomi perempuan masyarakat asli Papua yang ketiga yaitu dengan cara pembinaan berbasis kewirausahaan dengan cara di berikan berbagai pelatihan-pelatihan dan bimbingan dari dinas pemberdayaan perempuan Kota Jayapura.

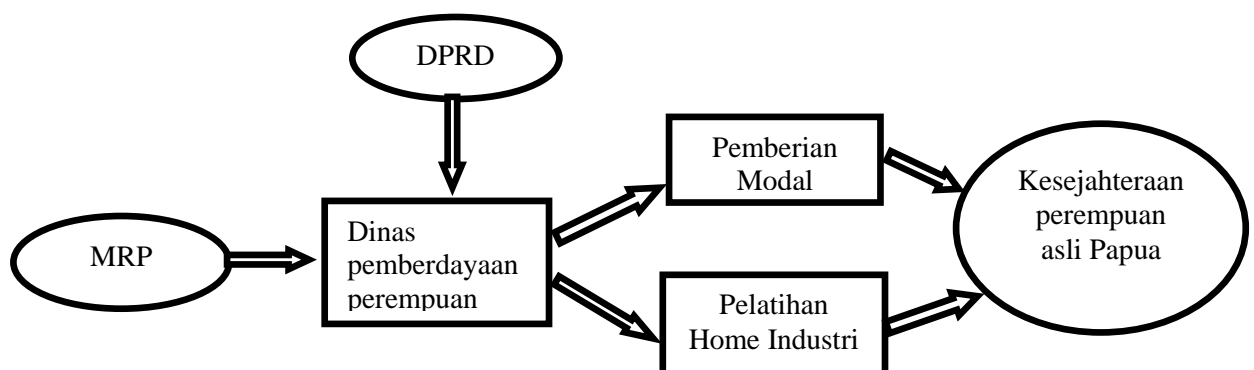
Upaya pemerintah memperdayakan masyarakat perempuan asli Papua di anggap tepat dilihat dari tiga sisi yaitu, *pertama*, menciptakan suasana yang

memungkinkan potensi masyarakat perempuan asli Papua berkembang. *Kedua*, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat perempuan asli Papua, perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dalam pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat perempuan asli Papua berdaya atau mampu dan, *ketiga* yaitu perlindungan dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua, melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat perempuan asli Papua bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian dari pemerintah Kota Jayapura. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Berikut peneliti akan menggambarkan model pemberdayaan perempuan asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai berikut :

Gambar 4.7 Diagram model pemberdayaan perempuan asli Papua



## **5. Dampak Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

Dalam perjalanan waktu, mama-mama asli Papua menghadapi berbagai permasalahan dengan hadirnya masyarakat pendatang yang sama-sama melakukan aktivitas perekonomian yang sama, kehadiran masyarakat pendatang tentu menimbulkan perubahan bagi pedagang mama-mama asli Papua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Siapa yang memiliki modal besar, maka dia yang bisa memilih tempat-tempat strategi untuk berdagang dan bisa memiliki banyak ruang-ruang. Secara perekonomian masyarakat pendatang terbilang baik maka mereka inilah yang menguasai tempat, sementara mama-mama asli Papua masih minim dengan modal sehingga mama-mama Papua susah untuk menyesuaikan.

Dengan adanya bantuan modal dari pemerintah Kota Jayapura maka perempuan asli Papua dapat menggunakan atau memutar bantuan modal tersebut sebagai modal usaha mereka, dengan penambahan modal usaha dari pemerintah, Mama-Mama asli Papua dapat berkembang menjadi pengusaha yang dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi. Mama Nelly yoku misalnya salah satu penjual di Pasar Mama-Mama Papua di Jayapura, mengatakan pihaknya berharap selain menjual pinang namun dapat juga menjadi pengusaha. Untuk itu berharap bantuan modal usaha dari pemerintah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat asli Papua. Adapun perkembangan ekonomi mama-mama Papua setelah adanya model pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua berdampak pada beberapa hal yaitu:

### 1. Tambahan barang dagangan

Dengan adanya bantuan modal dari pemerintah dinas pemberdayaan perempuan untuk mama-mama asli Papua berdampak pada barang yang di perjual belikan oleh para pedagang di pasar mama-mama Papua.

Salah satu mama-mama Papua yang peneliti wawancarai yaitu mama Nelly. Mama merupakan salah satu pedagang yang menerima bantuan dan aktif berjualan di pasar mama-mama Papua, mama mengatakan dengan adanya bantuan yang diterima dari pemerintah mama bisa berjualan yang sama seperti para pendatang, berikut petikan wawancara dengan mama<sup>62</sup>:

*“Mama senang dengan adanya bantuan dari pemerintah, mama bisa jualan yang lain, ini mama jual-jual mie rebus, sirup-sirup, kopi susu teh mama jual sesuai kebutuhan yang dong cari, karna dorang ini jualan di pasar sampe sore jadi lumayan buat tambahan mama, selain itu mama juga masih jualan pinang”*

Masih menurut mama Nelly bahwa, meskipun pemerintah memberikan bantuan modal namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan pemberian bantuan modal tidak diberikan setiap tahun, namun diberikan dengan cara bergilir. Oleh karena itu terkadang mama harus terpaksa meminjam modal dari koperasi simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Hal itu dilakukan apabila ada kebutuhan mendesak seperti kebutuhan untuk memborong barang dagangan dan setiap hari mereka menyeter selama 30 hari. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh mama Nelly sebagai berikut<sup>63</sup>:

*“Yaa mama ada ambil koperasi yang dikelola mama-mama Papua dipasar ini. Itu mama ambil kalo ada kebutuhan yang mendesak seperti*

---

<sup>62</sup>Nelly, wawancara (Jayapura, 25 Mei 2017)

<sup>63</sup>Nelly, wawancara (Jayapura, 25 Mei 2017)

*pake borong sagu,pinang dong juga kasih mama karna sudah percaya sama mama, mama kan setiap hari jualan dipasar”*

Dari keseluruhan persoalan yang dihadapi oleh pedagang dipasar mama-mama Papua dalam kegiatan jual beli disebabkan persoalan karna minimnya modal meskipun dari pemerintahan diberikan modal akan tetapi masih belum cukup jika hanya diberikan sekali saja. Oleh karena mama-mama asli Papua selalu berharap ada perhatian lebih dari pemerintah dalam memposisikan pedagang mama-mama asli Papua untuk mendukung mereka memperbaiki perekonomiannya dan meningkatkan kegiatan jual beli mereka.

## 2. Mata pencaharian

Secara garis besar kondisi perekonomian masyarakat Kota Jayapura khususnya masyarakat asli Papua mempunyai pekerjaan bermacam-macam. Pekerjaan di masyarakat meliputi bidang perdagangan, PNS, pelayanan dll. Lebih jelas dan detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Penduduk Asli Papua berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Kampung	PNS	Pelajar/ Mahasiswa	Sektor Informal	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kayubatu	7	27	66	<b>100</b>
2	Tahimasoroma	18	43	102	<b>163</b>
3	Tobati	6	71	185	<b>262</b>
4	Enggros	11	103	152	<b>266</b>
5	Nafri	63	291	393	<b>747</b>
6	Koya Koso	5	105	59	<b>169</b>
7	Holtekam	0	121	131	<b>252</b>
8	Koya Tengah	0	5	5	<b>10</b>
9	Skow Yambe	4	85	135	<b>224</b>
10	Skow Mabo	8	83	165	<b>256</b>

11	Skow Sae	10	85	92	<b>187</b>
12	Mosso	1	22	110	<b>133</b>
13	Yoka	49	228	325	<b>602</b>
14	Waena	16	61	185	<b>262</b>
<b>Jumlah</b>		<b>198</b>	<b>1,330</b>	<b>2,105</b>	<b>3,633</b>

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Jayapura dalam angka 2016*

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa penduduk asli Papua yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar 5% atau berjumlah 198 orang, sedangkan yang bekerja pada sektor swasta sebesar 58% atau berjumlah sekitar 2.105 orang dan selebihnya masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa.

Mayoritas penduduk asli Papua bekerja pada sektor informal, mata pencahariannya pun tergantung pada tempat dimana mereka tinggal, penduduk asli Papua bermukim di dataran tinggi banyak yang berprofesi sebagai petani, yang bermukim dipinggiran pantai berprofesi sebagai nelayan, sedangkan yang bermukim di tengah-tengah kota kebanyakan berprofesi sebagai pedagang. Hal ini tidak lepas dari lingkungan yang berdekatan dengan pasar mama-mama Papua.

Papua merupakan provinsi dengan tingkat produktifitas Sumber Daya Alam yang melimpah namun tidak dengan Sumber Daya Manusia yang mana jauh dari kata layak. Masyarakat asli Papua merasa tersisih, dengan adanya Majelis Rakyat Papua dan dikeluarkannya Undang-undang Otsus masyarakat asli Papua merasa terlindungi dan diberi perhatian lebih oleh pemerintah Kota Jayapura, terbukti dengan dibangunkannya sarana prasana pasar mama-mama Papua untuk menunjang perekonomian mereka.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah dengan dibangunkannya pasar khusus mama-mama Papua, menjadi sumber penghasilan tersendiri bagi mama-



mama Papua yang mana sebelum adanya kebijakan tersebut mama-mama Papua hanya sebagai peternak babi dan petani, dan itu hanya bisa dirasakan oleh penduduk yang bermukim disekitar pegunungan. Sedangkan mama-mama yang bermukim di kawasan perkotaan hanya berjualan pinang dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu menjadi sumber penghasilan bagi mama-mama Papua dapat bersaing dengan masyarakat pendatang dengan berjualan dipasar mama-mama Papua.

### 3. Pendapatan Tambahan

Dengan adanya model pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua, setidaknya perempuan asli Papua mampu untuk percaya diri tampil dan bersaing dengan masyarakat pendatang, mampu untuk berdagang dan bersaing secara sehat meskipun diluar batas kemampuannya.

Sebelum adanya model pemberdayaan ekonomi masyarakat atau mama-mama Papua hanya menjual pinang, kapur sirih dan hasil tanaman berkebun mereka, namun seiring berjalannya waktu dan kehidupan bersosial, mama-mama Papua pun berdagang tidak hanya sebatas hasil tanaman mereka, mama-mama Papua mulai berjualan buah-buahan, minuman-minuman sachet dan rujak, dan itu menjadi pendapatan tambahan mama-mama Papua.

### 4. Kehidupan Sosial

Sebagian besar penduduk Kota Jayapura Papua adalah beragama kristen, namun tidak menjadi penghalang bagi kehidupan sosial tergambar dari struktur masyarakat yang masih adanya paguyuban dan perkumpulan masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial.

Dengan bentuk struktur masyarakat perkotaan, maka masyarakat Kota Jayapura memiliki tingkat kepedulian dan kebersamaan yang tinggi terhadap sesama warga tanpa membedakan antar kulit putih (para pendatang) dan kulit hitam (masyarakat asli Papua) dengan sumbangsih peran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing yang merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat.

#### 5. Temuan Hasil Penelitian

Terkait dengan beberapa indikator yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan untuk mengetahui adanya dampak model pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua Kota Jayapura, maka berikut keadaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya.

Tabel 4.5 Keadaan Ekonomi Masyarakat Asli Papua

Indikator	Sebelum Adanya Model	Sesudah Adanya Model
- Mata Pencaharian	- Peternak Babi dan petani	- Pedagang dan usaha
Pendapatan Tambahan	Hanya menjual Pinang Kapur Sirih dan hasil berkebun mereka (Sagu, kasbi Betatas dan keladi)	Berdagang tidak sebatas hasil tanaman mereka, mulai berjualan buah-buahan, minuman-minuman sachet dan rujak (sudah mampu bersaing dengan pendatang )
Jumlah kesempatan kerja	Tidak ada	Perempuan asli Papua sudah mampu bersaing dan menduduki kantor-kantor pemerintahan Kota Jayapura

Program Pemkot untuk Masyarakat asli Papua	Tidak ada	Bimbingan (masyarakat perempuan asli Papua di kumpulkan dan di beri bimbingan ) Pelatihan-pelatihan (pelatihan home industri, pelatihan pembuatan bakso, pelatihan pembuatan kerajinan tangan)
Perubahan Sarana dan Prasarana	Tidak teratur dan apa adanya (masih tradisional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih teratur</li> <li>- Lengkap dengan ruang-ruang dan tenda untuk berteduh</li> <li>- Lebih berkonsep modern</li> </ul>

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti akan membahas hasil peneliti yang digambarkan oleh peneliti di bab IV. Berdasarkan fokus penelitian, peneliti akan membahas beberapa poin sebagai berikut:

#### **A. Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Majelis Rakyat Papua (MRP)**

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan melalui observasi dan wawancara tentang model pemberdayaan ekonomi melalui Majelis Rakyat Papua yang ada di Kota Jayapura:

##### **1. Model Pemberian Modal**

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, peneliti melihat bahwa model pemberdayaan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Papua melalui segmen Majelis Rakyat Papua (MRP) yaitu dengan cara pemberian modal kepada perempuan asli Papua, namun pemberian modal itu diberikan secara bergantian, tujuan dari diberikannya modal itu untuk modal usaha yang mereka jalani, agar bisa menghidupi keluarga.

Dalam perjalanan waktu ke waktu, mama-mama asli Papua ini menghadapi berbagai masalah dengan hadirnya pendatang yang sama-sama melakukan aktivitas lokasi kegiatan ekonomi yang sama. Kehadiran pendatang tentu menimbulkan perubahan bagi mama-mama asli Papua baik secara langsung maupun tidak langsung, perubahan tentunya ada positif ada negatif.

Perubahan positif antara lain itu kreativitas pedagang, pedagang mama-mama asli Papua yaitu menghadapi persaingan berupa:

1. Strategi pintu Utama
2. Modal sosial (relasi)
3. Kerja sama dengan anggota keluarga

Ketiga cara tersebut memberikan dampak positif dalam kegiatan jual beli (usaha) mereka, sehingga mereka dapat mempertahankan ekstensinya.

Menurut Mardi Yatmo Hutomo, tujuan dari model pemberdayaan melalui bantuan modal adalah dapat memecahkan masalah aspek modal dan dapat memunculkan usaha-usaha baru yang ada di tengah masyarakat.

Perubahan dari sisi negatif kurangnya modal untuk jual beli untuk bersaing dengan pendatang. Siapa yang memiliki modal besar maka dia bisa memiliki banyak ruang-ruang untuk berdagang. Pada umumnya para pedagang pendatang yang memiliki cukup modal, sehingga mereka memiliki banyak ruang-ruang. Sehingga Majelis Rakyat Papua mengintruksikan kepada pemerintah agar memperhatikan mama-mama Papua agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (al-mashlahah) yang diharapkan oleh manusia

tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.<sup>64</sup>

Sebagaimana Firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

*“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. al-anbiya’107).*

Sebagaimana dalam Islam saling membantu dengan cara memberi modal dalam Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Trimidzi dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda:

*“Berilah-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati”*

Dalam firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾



*“Berilah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.” QS. An-Nisa:4*

Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menghalalkan memakan sesuatu yang berasal dari hibah. Ini menunjukkan bahwa hibah itu boleh. Sedangkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam banyak sekali, diantaranya sabda Rasulullah Shallallahu‘alaihi wa sallam :

تَهَادُّوا تَحَابُّوا

*“Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai” (HR. Al-Bukhâri dalam al-Adabul Mufrad no. 594).<sup>65</sup>*

<sup>64</sup> Adimarwan A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 318

Demikian juga sabda Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

العائدُ فيهِ يَهْكَا لِكُلِّ عُوْدٍ فِي قَيْتِهِ ۖ

“Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya”.(HR. Al-Bukhari)

Larangan menarik kembali hibah dalam hadits ini menunjukkan secara tegas bahwa hibah ini disyari’atkan.

Memberikan bantuan modal Pada Mama-mama Papua merupakan usaha untuk mengubah perekonomian mereka kepada satu keadaan yang lebih baik, menjadikan semakin mama mama Papua meningkatkan usahanya agar dapat membantu menhidupi keluarganya. Pemberian modal dalam Usaha membangun masyarakat dipandang juga sebagai kaedah kerja untuk mencapai berbagai tujuan mama-mama Papua, serta memperbaiki keadaan dan perpaduan masyarakat Pendatang, memadukan berbagai kemudahan untuk membantu masyarakat khususnya mama-mama Papua. Dengan demikian, untuk membangun mama-mama Papua perlu pemberian untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh Mama-mama Papua di Kota Jayapura melalui Pemberian Modal.

## 2. Pelatihan Home Industri

*Home industri* adalah semua kegiatan Ekonomi berupa pengolahan barang menjadi bernilai tinggi untuk penggunaanya, dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah atau perusahaannya kecil seperti industri rumah tangga dan kerajinan.

---

<sup>65</sup>Kitab 9 no. 1601.

Dalam Kerangka pengembangan Model Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang dilaksanakan melalui pengembangan Home Industri berbasis budaya: yaitu pelatihan ketarampilan Noken, pembuatan bakso ikan maka tahap pertama dipilih dipilih mama-mama Papua dengan misi awal membangun sosial budaya terlebih dahulu dalam mengurangi kesenjangan gender.

Menurut Mardi Yatmo Hutomo, tujuan dari model pemberdayaan melalui Home Industri adalah untuk memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah dengan usaha besar.

Budaya saat ini masih sangat kental terutama dalam peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan sehingga perlu didorong bentuk partisipasi perempuan dan pentingnya mendorong keterlibatan laki-laki melalui setiap tahapan kegiatan usaha home industri baik sejak kegiatan hulu sampai hilir. Di dalam proses produksi, pemberdayaan ekonomi perempuan hendaknya juga dimulai pada tahapan pertama kegiatan agar perempuan mempunyai kemampuan bersaing dalam berprestasi misalnya dalam memelihara rumah tinggalnya, situasi lingkungan keluarga dan keberhasilan usahanya seperti masyarakat pendatang serta dalam melakukan kegiatan atau tugas yang diberikan oleh pendampingnya. Pendamping dari perorangan atau lembaga masyarakat harus diciptakan atau direkrut dari masyarakat yang berasal dari satu suku atau memanfaatkan kepala suku dan pemuka agama. Disamping itu di perlukan pula mentor serta tenaga pelatihan Home Industri.



Noken menurut masyarakat asli Papua adalah simbol kehidupan mereka. Noken (tas tradisional khas Papua) terbuat dari kulit kayu, kulit batang anggrek atau (sekarang) dari benang. Noken merupakan benda adat yang dipakai laki-laki dan perempuan namun sangat dekat dengan perempuan. Perempuan adalah yang menganyam noken dan yang paling sering memakainya sehari-hari. Perempuan adalah yang berkebun dan memakai noken membawa pulang hasil kebun atau menjualnya ke pasar. Perempuan menggendong bayi menggunakan noken, menimangnya, memastikannya tetap hangat, nyaman dan aman. Noken diperlukan untuk mempertahankan dan merawat kehidupan, secara faktual maupun simbolik. Proses menganyam noken dimulai dengan mencari, mengumpulkan dan memilah bahan-bahan utama yang berharga di hutan hingga merajutnya menjadi alat pembawa multiguna yang kuat dan lentur, siap difungsikan untuk mempertahankan dan merawat kehidupan.

Noken sangat dekat dengan perempuan sebab mereka yang menganyam atau merajut noken dan yang paling sering memakainya sehari-hari untuk membawa hasil kebun, hewan ternak dan untuk menggendong bayi. Noken diperlukan untuk mempertahankan dan merawat kehidupan, secara faktual maupun simbolik. Proses dan tujuan pendokumentasian ANK disimbolkan dengan tradisi Noken Papua.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Syivana Maria Apituley, dkk, *Anyem Kehidupan Noken*, Cetakan Pertama Jakarta, 2015, hlm 10

Gambar 4. Hasil kerajinan Noken



*Sumber: dokumen pribadi peneliti 2017*

Minimnya dukungan bagi penguatan ekonomi oleh pemerintah daerah makin melemahkan kekuatan ekonomi perempuan. Pada umumnya badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Kabupaten melaporkan terbatasnya bentuk dukungan yang dapat mereka berikan kepada mama-mama asli Papua. Program penguatan ekonomi perempuan asli terbatas pada pelatihan kewirausahaan dan tidak berkelanjutan karena sulit ditindaklanjuti, baik oleh pemda maupun oleh perempuan sendiri. Program dukungan dana usaha juga menemui banyak kendala karena kecilnya dana program yang diperoleh.<sup>67</sup>

Noken dimaknai juga sebagai "rumah berjalan" yang berisi segala kebutuhan. Selain itu, noken dianggap sebagai simbol kesuburan bagi kaum perempuan.<sup>68</sup>

Noken sendiri bukan hanya dilihat sebagai tas gantung melainkan sebuah simbol kehidupan bagi perempuan Papua, karena dari noken itulah anak-anaknya bisa bersekolah hingga menjadi pejabat daerah, dan lain sebagainya.

<sup>67</sup> Anyam Kehidupan Noken, hlm 50

<sup>68</sup> Itha Ulumuddin, *Kebudayaan Indonesia Lestarian Apa Yang Hendak Di Lestarian*, Jakarta, Penerbit PT Gading Inti Prima, Jakarta, 2013, hlm 19

Anyam Noken Kehidupan. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 47 bahwa “untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki”.

Semua ini menunjukkan bahwa bahwa produktivitas perempuan terbuka lebar dalam Islam. Hampir tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan dalam sektor pekerjaan, baik publik maupun domestik. Islam sebagai agama yang menghormati hak asasi manusia (*huquq al-insaniyah*) telah memberikan kebebasan berprosesi kepada ummatnya.<sup>69</sup> Basic normatif yang di canangkan islam sangat jelas yakni sebagai berikut:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالذَّيْنَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْدُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥)

*"Sesungguhnya aku tidak menya-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS.Al-Imran:195)*

Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan.

<sup>69</sup>H. Misbahul Munir, Lc, M.El, *Produktivitas Perempuan Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam*, UIN Maliki Press, 2010, hlm 106

Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

## **B. Dampak Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP)**

Di sub bab ini peneliti akan menganalisa tentang pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua setelah adanya Majelis Rakyat Papua (MRP) berdasarkan UU No 21 Tahun 2001. Dalam hal ini peneliti akan mengaitkannya dengan konsep Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang pemberdayaan ekonomi perempuan tersebut.

### **1. Kebebasan mobilitas**

Terbentuknya Majelis Rakyat Papua, membuat masyarakat asli Papua khususnya perempuan asli Papua menjadi percaya diri untuk pergi ke luar rumah atau keluar dari wilayah tempat tinggalnya terbukti masyarakat perempuan asli Papua banyak menjadikan pasar sebagai tempat mereka mencari nafkah.

Otonomi Khusus bagi Tanah Papua dibentuk sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua yang dilindungi Konstitusi negara Republik Indonesia tahun 1945, melalui keberpihakan (affirmative action), perlindungan (protection) dan pemberdayaan (empowerment). Bertolak dari sini, kebijakan pembangunan Papua sudah selayaknya tak semata berfokus pada aspek ekonomi rakyat orang asli Papua, tetapi sekaligus juga mengukuhkan struktur sosial, adat-istiadat, kearifan lokal yang bersumber pada budaya dan hutan adat. Eksistensi orang asli Papua yang meliputi sekitar 250 suku yang berbeda berkait-paut dengan hutan adat. sub suku dan Paradigma pembangunan yang menekankan aspek padat modal, teknologi maju dan berorientasi ekspor tanpa menghormati perbedaan dan

kekhasan budaya dan ekonomi masyarakat asli lambat-laun akan mengusir masyarakat asli dari hutan adat mereka sendiri dan sekaligus memusnahkan adat-istiadat. Proses pembangunan berskala besar yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi haruslah mengindahkan kearifan lokal termasuk nilai-nilai dari tanah adat sebagai tanda penghormatan terhadap kebudayaan lokal.

Kehadiran MRP di sisi lain juga memastikan berjalannya proses demokrasi di Papua. Hal itu dimungkinkan karena besarnya peluang saling mengimbangi antara tiga pilar kekuasaan di Papua. Posisi yang saling mengimbangi itu akan membuka peluang lebih besar bagi rakyat Papua untuk berpartisipasi dan mengontrol jalanya pemerintahan dan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak-hak asli orang Papua. Terbukanya ruang partisipasi dan kontrol yang luas dengan sendirinya akan memperkuat proses demokrasi lokal di Papua.<sup>70</sup>

Hanya dalam pelaksanaannya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan Papua belum maksimal dan sinergis. Bahkan, dana OTSUS yang dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan (6%) belum banyak dirasakan secara langsung dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Pada dasarnya, Islam tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada yang membedakan hal tersebut di mata Allah kecuali tingkat ketaqwaan yang membedakannya. Dalam al quran banyak disebutkan ayat-ayat yang gamblang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama. Allah swt berfirman dalam surat Al Hujuraat ayat 13:

---

<sup>70</sup>[http //baptis.blogspot.co.id/2011/02/Majalis-rakyat-papua,pilar-ketigahtml](http://baptis.blogspot.co.id/2011/02/Majalis-rakyat-papua,pilar-ketigahtml), diakses tanggal 25 Juli jam 13: 39

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dari ayat di atas Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa), dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi untuk saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan atau kekayaan karena yang mulia diantara manusia disisi Allah hanyalah orang yang bertakwa kepada-Nya.<sup>71</sup>

Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan merupakan sosok yang dijunjung tinggi martabatnya di masa Rasulullah Saw. Kehadiran Nabi SAW mampu melakukan perubahan yang sangat radikal dalam kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dari posisi perempuan sebagai objek yang dihinakan dan di lecehkan menjadi subjek yang dihormati dan diindahkan. Bahkan, dengan kehadiran Nabi Saw. Dia mengajarkan keharusan merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tradisi arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan. Selanjutnya Nabi mempromosikan posisi ibu sangat tinggi, bahkan derajatnya lebih tinggi tiga kali dari ayah di tengah masyarakat yang memandang ibu

<sup>71</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-qur'an dan Hadits*, 2009, (Jakarta, Widya cahaya), Jilid 5 hal 419

hanyalah mesin produksi. Nabi juga menempatkan istri sebagai mitra sejajar suami di saat masyarakat memandang sebagai objek seksual belaka.<sup>72</sup>

Ajaran Islam secara substansial telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Islam memandang perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, walaupun ada perbedaan, maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan bantu membantu.

## **2. Kemampuan membeli komoditas kecil dan besar**

Kemampuan masyarakat perempuan asli Papua untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu dan kebutuhan dirinya sendiri. Masyarakat perempuan asli Papua telah dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uang sendiri.

Dalam Islam sendiri wanita dan pria diciptakan oleh Allah sebagai mitra yang diberi tanggung jawab untuk melestarikan jenis manusia dan memelihara kehidupan. Keduanya juga diberi tanggung jawab untuk mengelola alam semesta beserta seluruh isinya<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006, hlm.3

<sup>73</sup>Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm 113

### **3. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga**

Masyarakat perempuan asli Papua mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian ternak maupun memperoleh kredit usaha.

UU Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan peluang bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Interaksi dengan masyarakat dan khususnya perempuan Papua selama ini menyiratkan bahwa:

1. Peran perempuan Papua sangat bergantung pada pendidikan dan keterampilan
2. Peran perempuan Papua bergantung juga pada karakter pribadi perempuan
3. Peran perempuan Papua bergantung pada akses yang diberikan kepada perempuan untuk berkreasi dan berekspresi. Akses yang terbuka lebar dan dapat menjadi pintu masuk adalah melalui partisipasi dalam organisasi menggereja, dan dalam organisasi kemasyarakatan.

Salah satunya pandangan bahwa rendahnya tingkat pendidikan menjadi satu faktor yang berkontribusi pada terbatasnya wawasan penduduk Papua yang nantinya berakibat pada cara pandang mereka tentang perempuan. Perempuan Papua ibarat “harta” yang bisa digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Ketika peperangan usai tidak jarang perempuan dipertukarkan sebagai simbol perdamaian. Di satu sisi istilah “simbol perdamaian” seperti menempatkan perempuan pada posisi penting, tetapi posisi ini justru mendorong manipulasi dan



eksploitasi. Perempuan sengaja ditempatkan sebagai alat tukar dan perempuan tidak mampu mengelak karena kuatnya konstruksi adat.<sup>74</sup>

Dominannya pendatang dibidang ekonomi dan derasny arus pendatang membuat orang Papua tersingkir, baik di lapangan ekonomi, mau pun penguasaan atas tanah, baik hutan mau pun garapan. Saat ini penduduk provinsi Papua diperkirakan 2.352.518 jiwa. Di tahun 2000 diperkirakan orang asli Papua jumlahnya sekitar 1.5 juta jiwa. Untuk hal ini, MRP harus segera mengagendakan satu Perdasus untuk pemberdayaan orang asli Papua agar mampu bersaing dalam sektor ekonomi produktif. Dengan demikian dominasi pendatang dalam bidang ekonomi tidak menyingkirkan orang asli Papua. Selain itu juga berkaitan dengan pengaturan mengenai penguasaan tanah dan tata cara pelepasan hak atas tanah, terutama tanah ulayat. Hal ini penting karena sangat berkaitan dengan masyarakat Adat.<sup>75</sup>

#### **4. Kesadaran hukum dan politik**

Hadirnya program-program pemerintahan untuk memberdayakan ekonomi perempuan asli Papua membuat mama-mama Papua yang terlibat didalamnya sadar akan hukum dan politik yang ada di Kota Jayapura. Mama-mama Papua mengetahui nama-nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat dan mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

---

<sup>74</sup>Muridan S. Widjojo, *Perempuan Papua dan Peluang Politik di Era Otsus Papua*, Vol. 38, No. 2, Desember 2012, hlm 14

<sup>75</sup>[http //baptis.blogspot.co.id/2011/02/Majalis-rakyat-papua,pilar-ketigahtml](http://baptis.blogspot.co.id/2011/02/Majalis-rakyat-papua,pilar-ketigahtml), diakses tanggal 25 Juli jam 22:02

Dalam penerapannya mama-mama Papua yang ada di Kota Jayapura adalah yang mencari kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarganya yang mana ini adalah tradisi adat mereka, sehingga perempuan-perempuan Papua adalah tulang punggung bagi keluarganya dikarenakan tradisi yang ada dengan alasan karena telah diberi mahar seekor babi, oleh karena itulah suami mereka tidak bekerja. Realitanya kehidupan mama-mama Papua seakan sangat jauh dengan kehidupan di kota besar seperti Jakarta. Mama-mama di Papua dengan adat sehingga dia harus bekerja memenuhi kebutuhan seorang diri menjadi tulang punggung keluarga. Keindahan alam Papua menjadi saksi bisu bagaimana para mama-mama Papua berjuang seorang diri dalam mencari nafkah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat dua model pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua melalui Majelis Rakyat Papua yaitu:

- a. Model *pertama*, pemberdayaan melalui pemberian modal. Perubahan dari sisi negatif kurangnya modal untuk jual beli untuk bersaing dengan pendatang. Siapa yang memiliki modal besar maka dia bisa memiliki banyak ruang-ruang untuk berdagang. Pada umumnya para pedagang pendatang yang memiliki cukup modal, sehingga mereka memiliki banyak ruang-ruang. Sehingga Majelis Rakyat Papua mengintruksikan kepada pemerintah agar memperhatikan mama-mama Papua agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan memberikan modal. Dengan tujuan membantu mengembangkan usaha yang di buat mama-mama asli Papua yang ada di Kota Jayapura.
- b. Model pemberdayaan melalui pelatihan home industri. Dalam Kerangka pengembangan model peningkatan produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang dilaksanakan melalui pengembangan Home Industri (IR) berbasis budaya: yaitu pelatihan ketarampilan Noken, pembuatan bakso ikan maka tahap pertama dipilih mama-mama Papua dengan misi awal membangun sosial budaya terlebih dahulu dalam mengurangi kesenjangan ekonomi mama-mama Papua.

2. Dampak pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua Melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) yaitu:

- a. Kebebasan Mobilitas. Dengan adanya Majelis Rakyat Papua, kemampuan masyarakat asli Papua untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya menjadikan mereka percaya diri dan mampu berkembang.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil dan besar. Kemampuan masyarakat perempuan asli Papua untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu dan kebutuhan dirinya sendiri. Masyarakat perempuan asli Papua telah dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uang sendiri.
- c. Terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga. Masyarakat perempuan asli Papua mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian ternak maupun memperoleh kredit usaha.
- d. Kesadaran akan hukum dan politik. Hadirnya program-program pemerintahan untuk memberdayakan ekonomi perempuan asli Papua membuat mama-mama Papua yang terlibat didalamnya sadar akan hukum dan politik yang ada di Kota Jayapura. Mama-mama Papua mengetahui nama-nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat dan mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

**B. Saran**

Dengan pemberdayaan ekonomi perempuan asli Papua, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Jayapura khususnya perempuan asli Papua yang kurang berdaya. Untuk itu perlu bimbingan dari pemerintah dan kelompok-kelompok adat yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, CV Diponegoro, 2006
- Adimarwan A Karim, *Bank Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopeida Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadist*, Widya Cahaya, Jakarta, 2009
- Bachtiar S Bachri, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, *Jurnal Teknomolgi Pendidikan*, Vol.10 No.1, April 2010
- BPS Kota Jayapura, *Gambaran Umum Kondisi Daerah*, 2010-2014
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT.Renika Cipta, Jakarta, 2009
- Badan Pusat Statistik Kota Jayapura dalam angka 2016
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT.Refika Aditama, 2014
- Eni Maryanti dan Zulkarnaini, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2014
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- [Http //baptis.blogspot.co.id/2011/02/Majalis-rakyat-papua,pilar-ketigahtml](http://baptis.blogspot.co.id/2011/02/Majalis-rakyat-papua,pilar-ketigahtml)
- Ihya Ulumuddin, *Kebudayaan Indonesia Lestarkan Apa yang Hendak di Lestarkan*, PT. Gading Inti Prima, Jakarta, 2013
- Jaenal Effendi & Wirawan, Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana ZakatInfaq dan Sedekah, *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol 1 No.2, 2013
- Kitab 99
- Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000
- Moh.Ali Aziz, Rr.Suhartini, A Halim Khambali, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, Pustaka Pesantren, 2005
- M Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002

*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014

M. Djunaidi, Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, AR-RUZZ MEDIA, 2014

Misbahul Munir, *Produktivitas Perempuan Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam*, UIN Maliki Press, 2010

Muridan S Widjojo, *Perempuan Papua dan Peluang Politik di Era Otsus Papua*, *Masyarakat Indonesia Vol 38, No.2, 2012*

Nur Hidayah, *Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan*, Vol.XIV, No.1, 2014  
Nawawi, Hadari dan Mimi Martiwi, *Penelitian Terapan*, Renika Cipta, Jakarta, 2002

Pemerintah Kota Jayapura, *Gambaran Umum Kondisi daerah*, 2012-2016

Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah Pascasarjana UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2015

P. Eko Prasetyo dan Siti Maisaroh, *Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*, *Trikonomika*, ISSN 1411-514X, Volume 8, No. 2, Desember 2009

Paskalis Keagop dkk, *Rekam Jejak Majelis Rakyat Papua 2005-2010*, Suara Perempuan Papua, Jayapura, 2010

Randy Wrihatnolo dan Rian Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, PT.Alex Media Komputindo, Jakarta, 2007

RPMJD Kota Jayapura 2012-2016

Siti Amanah & Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan Keunikan Agrosistem dan Daya Saing*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014

Sri Suhandjati, *Ragam Pemberdayaan Perempuan Versi Organisasi Perempuan Islam Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010

Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya*, Pustaka Pelajar, 2011

- Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press. 2002
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, PT.Renika Cipta, Jakarta, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Syivana Maria Apiuley dkk, *Anyem Kehidupan Noken*, Cetakan pertama, Jakarta, 2015
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Kibar Press, Yogyakarta, 2006
- Sii Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004
- Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (eds.Revisi)*, Alfabeta Bandung, 2015
- UU No 21 tahun 2001, *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Bab 1 Pasal 1 Poin





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/69/2017  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

06 April 2017

Kepada

Yth. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Kota Jayapura  
Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Pahri  
NIM : 15800005  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : 1. H. Slamet, M.M., Ph.D.  
2. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si.  
Judul Tesis : Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Majelis Rakyat Papua  
(Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.  
NIP. 195612311983031032



# PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA

Jln. Raya Abepura-Kotaraja-Jayapura Telp. (0967) 582125, Fax. (0967) 582087  
Web. www.mrp.papua.go.id, email majelisrakyatpapua@yahoo.co.id

Jayapura, 23 Mei 2017

Kepada :

Yth. **Direktur Universitas Islam Negeri**

**Malik Ibrahim Malang**

di -

Malang

No. surat : 070 / 224 / SET - MRP  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Telah  
Melaksanakan Penelitian  
dan Pengumpulan Data

Sesuai surat Saudara Nomor Un.03.PPs/HM.01.1/69/2017  
tertanggal 06 April 2017 Perihal Ijin Penelitian, maka kami  
sampaikan bahwa mahasiswa yang disebutkan di bawah ini :

Nama : PAHRI  
NIM : 15800005  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan data sesuai  
judul Tesis " *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui  
Majelis Rakyat Papua Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli  
Papua di Kota Jayapura* " pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui, terima kasih.

Pin. MAJELIS RAKYAT PAPUA  
SEKRETARIS  
  
BACHTIAR ARIYANTO, ST  
Pembina  
NIP. 19701218 200112 1 005

Tembusan Kepada Yang Terhormat :

1. Ketua Majelis Rakyat Papua, di Jayapura;
2. Para Ketua Pokja di Lingkungan Majelis Rakyat Papua, di Jayapura.



**PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Balai Kota No. 1 Entrop Jayapura - PAPUA 99224 Telp. (0967) 536765

Jayapura, 13 April 2017

Nomor : 070/2017  
Lampiran :  
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada  
Yth. Direktur Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang  
Di -

Malang

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BETTY ANTHONETA PUY, SE,MPA  
NIP : 19670424 199610 2 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
Dan Keluarga Berencana Kota Jayapura

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : PAHRI  
NIM : 15800005  
Jurusan/Prog.Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Jenjang Program : Pasca Sarjana

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian/pengumpulan data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Jayapura.

Demikian surat keterangan bukti penelitian dikeluarkan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA JAYAPURA



BETTY ANTHONETA PUY, SE, MPA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670424 199610 2 001





Foto Gedung  
MRP



Kepala Persidangan  
MRP Bapak  
Sineri, SH



Foto Bersama Kepala  
Persidangan MRP



Bapak Tondo Bulu  
Bagian  
Sekertariatan



Depan Gedung MRP



Kepala Dinas  
Pemberdayaan  
Perempuan Kota



Kepala Bagian  
Pemberdayaan  
Perempuan Kota



Kepala Bagian  
Pemberdayaan  
Perempuan



Bersama Mama-mama  
Papua di



Halaman depan Pasar  
sementara mama-  
mama Papua



Berasama mama-msma  
Papua



Suasana pasar  
Sementara



Mama-mama Papua  
jual hasil



Mama-mama Papua  
membuat



Mama-mama Papua  
pikul barang



Hasil buatan mama-  
mama Papua



Aulah Walikota



Pembukaan pelatihan  
Home Industri



Pemateri Asisten I  
Kota Jayapura



Suasana Pelatihan di  
luar ruangan



Mama-mama Papua  
mengikuti materi



Suasana pelatihan  
buat tas



Mama-mama Papua  
mendapatkan bantuan



Mama-mama Papua yang  
mendapatkan modal



Mama-mama Papua yang  
mendapatkan



Mama-mama Papua yang  
mendapatkan



Pusat Pelayanan Terpadu mama-

